



LAPORAN KINERJA

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Publik atas Kinerja Pelaksanaan selama kurun waktu tahun 2020 dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Gubernur Sulawesi Selatan yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu laporan ini juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur sejauhmana keberhasilan yang dicapai dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun mendatang. Tahun 2020, berbagai upaya program/kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang bersifat darurat. Salah satunya yang utama adalah dalam mengatasi wabah pandemic covid-19 yang sampai sekarang masih berlangsung.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak khususnya mengenai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kami menyadari bahwa isi laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak kesempurnaan laporan ini.

Makassar, Desember 2020

**KEPADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr. H. MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, M.H.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640729 200112 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kedudukan.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Aspek Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Misi.....	10
B. Tujuan dan Sasaran.....	11
C. Program untuk Perencanaan Sasaran.....	13
D. Perjanjian Kinerja.....	21
E. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
F. Rencana Anggaran TA. 2020	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian IKU Tahun 2020.....	25
B. Capaian Kinerja Sasaran.....	27
C. Akuntabilitas Keuangan.....	71
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	
1. <i>Struktur Organisasi</i>	
2. <i>Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran PK Tahun 2020</i>	
3. <i>Pengukuran Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019-2020</i>	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
II. 1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....12
2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....13
3	Program yang Dilaksanakan Tahun 2020 untuk Pencapaian Sasaran.....14
4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....21
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan.....22 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
6	Rencana Belanja APBD TA. 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....23
7	Alokasi Anggaran Per Sasaran23
III. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja25
2	Skala Nilai Pencapaian Kinerja IKU pada Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....25
3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1.....28
4	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....29
5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dan Target Nasional Capaian Kinerja Sasaran 1.....30
6	Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....31
7	Rata-rata Capaian IKK Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....33
8	Nilai SKP ASN Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....41

TABEL**Halaman**

9	Persentase Temuan Material Tahun 2018-2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	42
10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran 1.....	45
11	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2.....	48
12	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.....	49
13	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dan Target Nasional Capaian Kinerja Sasaran 2.....	50
14	Angka Kematian Ibu di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020.....	53
15	Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020.....	56
16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran 2.....	62
17	Situasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2020.....	73



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	Halaman
III. 1 Tingkat Capaian IKU Pada Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi	26
2 Grafik Kematian Ibu di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	53
3 Grafik Kematian Bayi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Struktural Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

✚ KEPALA DINAS KESEHATAN

a. Tugas Pokok

“ Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah ”

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Kesehatan.
2. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan.
6. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Dinas Kesehatan sebanyak 2 UPK dipimpin oleh masing-masing Kepala UPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Kesehatan Masyarakat (KESMAS) :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK):
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelaksanaan Kesehatan (UPK):
 - a. UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika
 - b. UPK Balai Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

(Bagan Struktur Organisasi terlampir)

D. ASPEK STRATEGIS

Selama kurun waktu tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan program-program prioritas dan didukung program lainnya yang secara sinergis dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan juga dilakukan melalui upaya peningkatan akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan peningkatan Kapasitas kelembagaan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjadikan penanganan krisis kesehatan sebagai salah satu program prioritas sebagai wujud pelayanan publik bidang kesehatan melalui peningkatan dan pengembangan layanan Brigade Siaga Bencana (BSB), penanganan dampak krisis akibat bencana dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak bencana dan resiko krisis kesehatan, dilakukan pengadaan ambulans darat dan ambulans laut untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka memfasilitasi layanan evakuasi, transportasi rujukan korban bencana dan krisis kesehatan, yang diprioritaskan pada daerah terpencil, pedalaman, pesisir dan kepulauan.

Sekaitan dengan penanganan KLB, pada awal tahun 2020, Dunia diperhadapkan pada wabah Covid-19 yang hingga sekarang masih berlangsung. Kasus Covid-19 secara resmi dilaporkan terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Maret 2020, sejalan dengan waktu Jumlah kasus Positif covid-19 semakin bertambah, hingga pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah kasus yang dilaporkan adalah 31.597 kasus. Walaupun Provinsi Sulawesi Selatan telah on-track dalam penanganan Covid-19, namun untuk mempercepat penanganan covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa strategi yang telah dilakukan untuk penanganan Covid-19. Strategi tersebut dinamakan **TRISULA** yaitu aggressive testing, contact tracing dan edukasi massif perubahan perilaku.

Untuk peningkatan pelacakan Covid-19, di Provinsi Sulawesi selatan telah tersedia laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten/Kota. Pada beberapa RS, juga terdapat mesin TCM yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium Covid-19. didukung tenaga tracing pada semua Puskesmas yang dibantu oleh Tim Tracing Kabupaten/Kota dan Provinsi serta relawan yang direkrut untuk membantu tracing kontak kasus covid-19 di Kab/Kota.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Gerakan 1.000 Tokoh Agama sebagai edukator Covid-19 kepada masyarakat. Untuk penanganan kasus Covid-19, di Provinsi Sulawesi selatan telah tersedia RS Rujukan dan Non Rujukan Covid-19 dengan peningkatan kapasitas TT Isolasi sebanyak 2.052 Tempat Tidur serta 154 Tempat Tidur Isolasi. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah melalui program Wisata Duta Covid-19 sebagai tempat isolasi dan karantina kasus.

Upaya lain dalam pencegahan Covid-19 yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah Vaksinasi Covid-19. Vaksin tersebut telah tersedia di Pusat dan Provinsi telah melakukan langkah-langkah persiapan dengan penyediaan sarana dan prasaranan, peningkatan SDM sebagai tenaga vaksinator, pendataan sasaran serta faskes yang mampu melakukan vaksinasi. Untuk tahap pertama sesuai petunjuk dari Pusat, sasaran pertama yang akan mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan disusul pelayan publik, lansia dan masyarakat lainnya.

Penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitasnya, dengan mempertimbangkan akses kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas sebagai sarana upaya pelayanan kesehatan primer dapat terjangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020 jumlah Puskesmas di Sulawesi Selatan sebanyak 462 unit yang terdiri dari 304 Puskesmas Perawatan dan 158 Non Perawatan. Keberadaan Puskesmas tersebut didukung oleh Puskesmas Pembantu sebanyak 1.321 unit.

Peningkatan kuantitas sarana pelayanan tersebut dibarengi upaya peningkatan mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien secara berkesinambungan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan pemberian pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat. Untuk menjamin hal tersebut perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan melalui Mekanisme Akreditasi. Data menunjukkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 454 Puskesmas telah melaksanakan Akreditasi (98,91%), jumlah ini memang tidak meningkat dari tahun 2019 mengingat kondisi pandemi covid-19, sehingga kegiatan survey untuk akreditasi Puskesmas tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini.

Sedangkan di tingkat pelayanan rujukan, beberapa upaya standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit antara lain kebijakan perpanjangan izin operasional RS yang mensyaratkan Rumah Sakit bersangkutan telah melakukan akreditasi diharapkan mampu meningkatkan persentase Rumah Sakit yang telah terakreditasi. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 114 RS yang terdiri dari 2 RS Vertikal milik Pemerintah Pusat (Kemenkes), 2 RS Pendidikan, 7 RS milik Pemerintah Provinsi, 34 RS Milik Pemerintah Kabupaten/Kota, 8 RS milik TNI/Polri dan 61 RS milik Swasta. Hingga akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 94 RS di Provinsi Sulawesi Selatan telah terakreditasi Nasional, terdiri dari 45 RS Pemerintah/TNI Polri dan 49 RS swasta.

Prioritas pembangunan kesehatan lainnya adalah pembangunan RS Regional, dimana sampai dengan tahun 2023 ditergetkan 6 RS Regional terbangun dan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan kesehatan sekunder (rumah sakit) yang terstandar yang diharapkan menjadi pusat rujukan dari pelayanan primer dari wilayah sekitarnya, terutama kasus kegawatdaruratan, yang membutuhkan akses cepat dengan penanganan/pertolongan yang tepat sehingga masyarakat di wilayah terisolasi/terpencil dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terbaik, termasuk akses rujukan lintas batas Kabupaten.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pekerjaan Master Plan untuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Regional Kabupaten Wajo, pekerjaan AMDAL untuk 3 lokasi RS Regional Kota Palopo, RS Regional Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Regional Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Regional Kabupaten Wajo dan telah dilaksanakan lelang pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk RS Regional Kota Palopo dan RS Regional Kabupaten Bone. Sedangkan pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pekerjaan Perencanaan (Manajemen Konstruksi) pembangunan RS Regional Bone dan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Regional Bone

Pengalokasian Anggaran di sektor kesehatan juga merupakan tombak dalam Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program antara lain penerapan paradigma sehat, pelaksanaan desentralisasi, mengatasi berbagai kedaruratan, peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS melalui upaya pengintegrasian Jamkesda ke BPJS. Pembiayaan Pembangunan Kesehatan harus memegang prinsip kendali mutu kendali biaya sehingga dengan anggaran yang memadai diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pelayanan kesehatan gratis/jamkesda yang diintegrasikan ke dalam program JKN tahun 2020 tetap dilaksanakan, dimana mekanisme pembayaran klaim dikelola oleh badan pengelola program JKN dalam hal ini BPJS Kesehatan. Program ini merupakan perimbangan (sharing) pembiayaan antara Pemerintah Provinsi (40%) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (60%) dengan ketentuan pesertanya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam program ini dan telah ditetapkan dengan surat Keputusan masing-masing Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp850.069.080.000,- dengan sharing 40% (Provinsi) sebesar Rp340.027.632.000,- dan 60% (Kabupaten/Kota) sebesar Rp510.041.448.000,- dengan jumlah peserta sesuai dengan usulan SK Bupati/Walikota sebanyak

1.686.645 Jiwa. Realisasi dana sebesar Rp623.815.473.00.- dengan rincian Provinsi (40%) Rp253.126.189.200,- dan realisasi dana 60% (Kabupaten/Kota) sebesar Rp379.689.283.800.-.

Di sektor peningkatan kesehatan keluarga, dalam rangka upaya penanggulangan balita stunting, gizi buruk dan gizi kurang dilaksanakan program prioritas lainnya yaitu Gerakan perbaikan gizi 1000 hari pertama kehidupan anak atau gerakan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), merupakan upaya dalam memperkuat komitmen rencana aksi percepatan perbaikan gizi sejak 1000 hari dari masa kehamilan hingga usia dua tahun termasuk upaya penurunan jumlah kasus kematian Ibu dan anak juga dilakukan melalui pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pendekatan Continuum of Care yang diberikan sejak masa prahamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi hingga remaja (Pria dan Wanita Subur).

Di bidang pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga memberikan kontribusi pada kemajuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain di tahun 2020 Angka Kejadian Tuberkulosis sebesar 205/100.000 penduduk masih di bawah batas angka yang ditargetkan (207/100.000 Penduduk), angka penemuan/kejadian penyakit malaria (API) sebesar 0,17/1.000 penduduk, masih jauh di bawah angka yang ditargetkan yaitu sebesar 1/1.000 penduduk. Begitu pula di sektor kesehatan lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk indikator Cakupan Pengawasan Kualitas Air Minum mencapai 89,96% dan Cakupan Akses Sanitasi Dasar Masyarakat sebesar 98,99%, telah melampaui target tahun 2020.

Dari segi ketenagaan, hingga tahun 2020 pemenuhan rasio tenaga kesehatan di Sulawesi selatan sdh mencapai 70%, dengan rasio Dokter Umum sebesar 18/100.000 penduduk artinya setiap 100.000 penduduk Sulawesi Selatan dilayani 18 dokter umum, rasio dokter spesialis 16 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi 7 per 100.000 penduduk, rasio perawat 89 per 100.000 penduduk, rasio bidan 54 per 100.000 penduduk, rasio ahli gizi 10 per 100.000 penduduk,

rasio ahli sanitasi 8 per 100.000 penduduk, rasio apoteker 10 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan masyarakat 17 per 100.000 penduduk.

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat bukan hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan melainkan multisektoral termasuk individu dan keluarga khususnya dalam menangani permasalahan yang muncul akibat pandemi covid-19. Selain itu tantangan lainnya adalah kita memasuki era Revolusi 4.0/Era Digital/Transformasi Digital yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar negara, berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang sangat canggih. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat dihindari telah memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan akan menggeser sistem pelayanan kesehatan di negara kita yang tidak sesuai dengan masyarakat milenial.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI MISI

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkarakter”**

Bila melihat rumusan visi di atas, di sektor pembangunan kesehatan dapat diterjemahkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 berupaya untuk mewujudkan kondisi Pemerintahan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mewujudkan kondisi visi tersebut, dirumuskan 5 misi pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan dirumuskan sebagai berikut :

✚ Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

✚ Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter sehingga terwujud kepuasan masyarakat terhadap pembangunan kesehatan. Tentu saja hal ini membutuhkan strategi khusus melalui pengintegrasian program pembangunan kesehatan ke dalam program pembangunan strategis lain dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan:

1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

MISI 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Tujuan:

1. Meningkatnya derajatnya kesehatan masyarakat

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1
**TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA
 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	75,74	78
	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,17	100
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen (%)	98	100
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	4	0
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,50
	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/ KH)	94	90
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	6	4
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	30,59	18,59

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

Sasaran :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Tabel II.2
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	75,74	81
	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	95,17	100
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen (%)	98	100
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	4	0
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,08	70,80
	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/ KH)	94	90
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	6	4
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	30,59	18,59

C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2020
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Bencana (BSB)
	Program Pembangunan Rumah Sakit Regional
	Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
	Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit
	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	

Pelaksanaan Program di atas didukung Sebanyak 119 Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Yang Dijabarkan Dalam DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagai Berikut:

- a. Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB)**
1. Pemeliharaan Ambulans Laut
 2. Operasional dan Krew Kapal

b. Program Pembangunan Rumah Sakit Regional (Prioritas)

1. Pembangunan Rumah Sakit Regional

c. Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

d. Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)/(Prioritas)

1. Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi Pada Anakl.
2. Penyediaan Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dalam Rangka Pananggulangan Stunting.
3. Penyediaan Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan dalam rangka Penanggulangan Stunting.

e. Program Pengembangan Spesialis dan Kualitas Layanan Rumah Sakit

1. Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit

f. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Pengadaan Bahan Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium dan Bahan Logistik Kesehatan.
2. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kefarmasian

g. Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)

1. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang (KEK) dan Balita Kurus Pada 11 KabupatenLokus (DAK Fisik)
2. Orientasi Asuhan Gizi Ter Standar (PAG) Bagi Petugas Gizi Puskesmas (TPG) (DAK)
3. Pelatihan Praktek Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) (DAK)
4. Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk Bagi Tim Asuhan Gizi Puskesmas Dan Rumah Sakit (DAK)

5. Konvergensi (Koordinasi Intervensi, dan Integrasi) Penanganan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (DAK)
6. Orientasi Kahort Bayi dan Balita
7. Dukungan Satker
8. Konsultasi dan Sinkronisasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Konsultasi DAK Kepusat
10. Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
11. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020
12. Rapat Koordinasi Saka Bakti Husada (SBH) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kemitraan Jejaring Kerja dengan Mitra Potensial Terkait Germas
14. Penguatan Pangkalan Gugus Depan Saka Bakti Husada (SBH)
15. Penguatan UKBM Melalui Posyandu Aktif Kabupaten/Kota (DAK)
16. Orientasi Komunikasi Antar Pribadi (Kap) Terkait Stunting (DAK)
17. Mobilisasi Sosial Melalui Kampanye dan Pameran Germas dan Issu Nasional (Stunting, TB dan Imunisasi) (DAK)
18. Orientasi Pemberdayaan Lansia dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia (DAK)
19. Penguatan AMP (Audit Maternal Prinal dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB (DAK)
20. Penguatan Pembina Kader Kesehatan Guru-Guru Paud TK tentang Buku KIA dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)(DAK)
21. Advokasi dan Sosialisasi Germas dan Stunting (DAK)
22. Orientasi Konseling dan Pelayanan KB
23. Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur) (DAK)

24. Penguatan Kabupaten/Kota dalam Membina Posyandu Remaja (DAK)
25. Bimbingan Teknis Pembinaan Gizi dalam Rangka Penanganan Stunting di Sulawesi Selatan
26. Percepatan Penanganan Stunting Melalui Peran Perguruan Tinggi dan Lintas Sektor/Lintas Program Sulawesi Selatan
27. Orientasi Pemanfaatan Buku KIA
28. Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)
29. Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
30. Implementasi Penanganan Stunting Melalui Pemanfaatan Data e-PPGEMSurveilans Gizi di KabupatenLokus Stunting

h. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
2. Sosialisasi Tatalaksana dan Diagnosa DBD/Penyakit Arbovirosis Lainnya Bagi Tenaga Dokter (DAK).
3. Bimtek Peningkatan Kewaspadaan Dini Penyakit DBD (DAK)
4. Sosialisasi Dan Advokasi Pelaksanaan POPM Kecacingan dan Mencegah
5. Orientasi/Sosialisasi Program P2 Hepatitis dan Penyakit ISPA
6. Pemeriksaan Laboratorium Hepatitis (DAK)
7. Bimtek Terpadu Upaya P2P Program HIV AIDS dan IMS (DAK)
8. Pemeriksaan Laboratorium HIV/AIDS (DAK)
9. Monitoring Dan Evaluasi P2 ISPA
10. Orientasi/Sosialisasi Publik Private Mix TB Tk.Kabupaten/Kota
11. Supervisi Support Program TB, TB MDR dan TB HIV (DAK)
12. Pengadaan Media Kie Upaya Pencegahan Penyakit TB (DAK)
13. Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel Paket Spesimen TB (DAK)
14. Bimtek Program P2 Kusta dan Prambusia Di Kabupaten/Kota (DAK)
15. Sosialisasi Survellans Vektor Malaria dan DBD Berbasis Website dan Android (DAK)
16. Monitoring dan Evaluasi Program Zoonosis (DAK)

17. Monev Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Terpadu (DAK)
18. Validasi Data Program P2ML (Penyakit Hepatitis dan Penyakit Infeksi SaluranPencernaan Serta Penyakit ISPA (DAK)
19. Pengadaan Media KIE Upaya Pencegahan Penyakit Menular (DAK)
20. Penyelidikan Penanggulangan KLB Penyakit Menular
21. Verifikasi Alert /Rumor Penyakit Menular Potensial KLB (DAK)
22. Pemantauan /Pelacakan Penyakit Potensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) (DAK)
23. Pengembangan Provinsi Epidemiologi Surveillance Team (PEST) (DAK)
24. Review Tim Gerak Cepat (TGC) (DAK)
25. Pertemuan Refreshing District Suveillans Offcer (DSO) (DAK)
26. Penyegaran Bagi Petugas Imunisasi (DAK)
27. Pelaksanaan Self Assesment Vaksin Management (EVM) (DAK)
28. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Serta RAD Program Imunisasi TingkatKabupaten/Kota (DAK)
29. Pertemuan Pembahasan Pencapaian Imunisasi dan Kasus PD3I TingkatKabupaten/Kota (DAK)
30. Penyusunan Renstra Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella 2020-2024 Tingkat Provinsi
31. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Serta Penyusunan Kegiatan ProgramPencegahan dan Pengendalaian Penyakit TA.2021
32. Pengadaan Media KIE PTM (DAK)
33. Supervisi dan Bimlek Program P2PTM (DAK)
34. Seminar Kanker dalam Rangka Hari Kanker Sedunia (DAK)
35. Orientasi Program GIF RBM di Kabupaten/Kota (DAK)
36. Pelatihan Deleksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Bagi Dokter dan BidanPuskesmas (DAK)
37. Supervisi dan Bimtek Program Keswa dan Napza di Kabupaten/Kota (DAK)

38. Sosialisasi Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Tingkat Provinsi Sulsel (DAK)
39. Pertemuan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Lintas Program dan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Suisel (DAK)
40. Sosialisasi Sistem Infomasi Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi(DAK)

i. Program Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

1. Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) (DAK)
2. Sosialisasi 5 Pilar STBM(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Bagi TenagaKesehatan di Kabupaten Kota Dan Puskesmas
3. Pelaksanaan Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar di Desa Lokus Stunting (DAK)
4. Monitoring Pasca Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar di Kabupaten Lokus Stunting (DAK)
5. Monitoring dan Pendampingan STBM di Lokasi Stunting (DAK)
6. Orentasi dan Pembinaan Higiene Sanitasi Pemejamah Pangan danPenanggung Jawab Tempat Pengelolaan Makanan
7. Pembinaan Serifikasi Dan Stikerisasi Tempat Pengolaan Makanan (DAK)
8. Orentasi Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU) (DAK)
9. Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi PetugasPuskesmas RS dan Fasyankes Lainnya (DAK)
10. Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes (DAK)
11. Sosialisasi Desa/Kelurahan Sehat Iklim di Provinsi (DAK)
12. Penguatan Forum Kabupaten/Kota Sehat (DAK)
13. Orientasi Tim Verifikator
14. Mengikuti Pertemuan Kegiatan Pusat (DAK)
15. Konsuitasi Pusat (DAK)
16. Sosialisasi K3 Perkantoran (DAK)
17. Sosialisasi Pengukuran Kebugaran ASN (DAK)
18. Bimbingan Teknis K3 Di Fasyankes(DAK)

19. Orientasi Penyakit Akibat Kerja pada Petugas Kesehatan di Provinsi (DAK)
20. Sosialisasi Kesehatan Pengemudi (DAK)

j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
3. Penyediaan Jasa Tenaga Non ASN
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor,Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Makanan Dan Minuman
7. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah

k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor / Asrama
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi /Apikasi Website

l. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
2. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
3. Pengumpulan dan Publikasi Data Dan Informasi OPD
4. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

m. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 ditetapkan 2 Sasaran yang memuat 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Tabel II.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya a kuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	78
	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen (%)	100
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	3
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,50
	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/KH)	93
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	6
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	27,59

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai dengan Revisi Renstra OPD yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output tetapi dinilai merupakan output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU.

Adapun IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulsel; BPS (Badan Pusat Statistik)
	Angka Kematian Ibu	(per 100.000 Kelahiran Hidup/KH)	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama dikali 100.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kabupaten/Kota)
	Angka Kematian Bayi	(per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH)	Jumlah kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama dikali 1000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kabupaten/Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulsel; Riskesdas; PSG

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 141.063.356.004,30,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6
RENCANA BELANJA APBD TA. 2020
DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	66.179.191.870,30	46,91
2	Belanja Langsung	74.884.164.134	53,09
JUMLAH		141.063.356.004,30	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel II.7
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN(Rp)	PROSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	8.066.005.647,-	5,72%
	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik		
	Persentase Temuan Material		

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	104.455.647.730,30,-	74,05%
	Angka Kematian Ibu	20.696.391,727,-	14,67%
	Angka Kematian Bayi		
	Prevalensi Balita Stunting	7.845.310.900,-	5,56%
TOTAL			100

Pada tabel di atas, jumlah rencana anggaranbelanja langsung untuk membiayai program/kegiatan sebesar Rp 141.063.356.004,30,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan besaran 94,28%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah sebesar 5,72% dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Selama tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Pemberian Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91% ≤	Sangat Tinggi	ST
2.	76% < 90%	Tinggi	T
3.	66% < 75%	Sedang	S
4.	51% < 65%	Rendah	R
5.	< 50%	Sangat Rendah	SR

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi } ^{*)}}{\text{Rencana } ^{**)}} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN IKU TAHUN 2020

Hasil pengukuran Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan per indikator kinerja pada tahun 2020 berdasarkan pemberian skala nilai peringkat kinerja di atas, sebagai berikut:

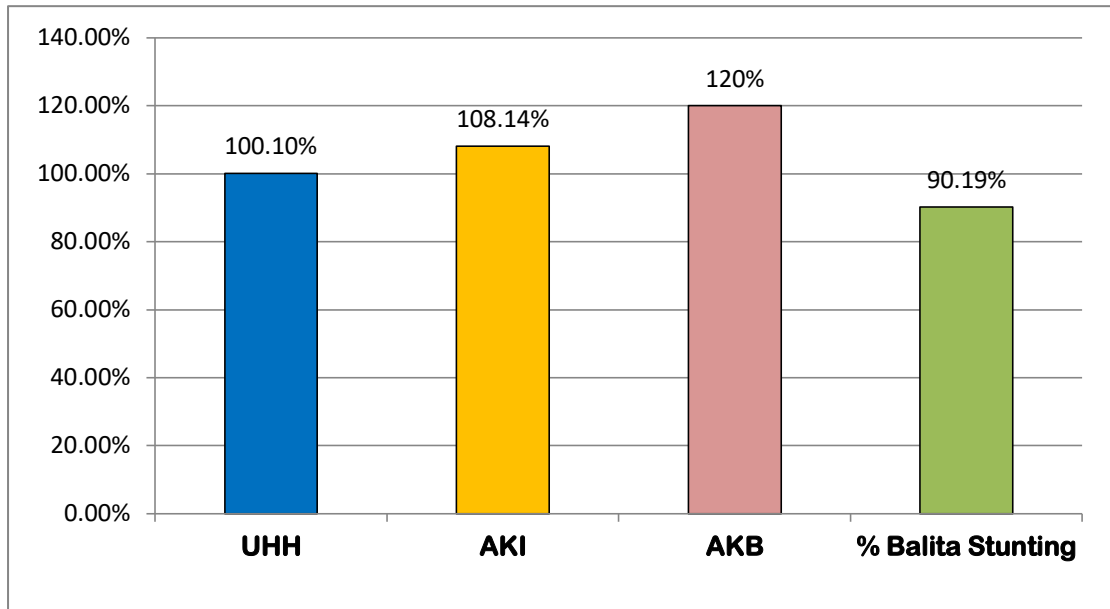
Tabel III.2
SKALA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU PADA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN IKU	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup(UHH)	100,10%	Sangat Tinggi	ST
	Angka Kematian Ibu	108,14%	Sangat Tinggi	ST
	Angka Kematian Bayi	120%	Sangat Tinggi	ST
	Prevalensi Balita Stunting	90,19%	Tinggi	T
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU		104,61%	Sangat Tinggi	ST

Rata-rata nilai pencapaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian dengan Skala “**Sangat Tinggi (ST)**”, dimana terdapat 3 (tiga) indikator menunjukkan capaian Sangat Tinggi (ST) dan 1 (satu) indikator menunjukkan capaian Tinggi (T).

Pencapaian kinerja IKU tahun 2020 bila digambarkan dalam sajian grafik akan terlihat seperti berikut ini:

Grafik III.1
**TINGKAT CAPAIAN IKU PADATAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Sasaran sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Di tahun 2020, Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah secara juga melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan dari Dokumen Rencana Strategis hingga Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Sesuai dengan Revisi Renstra, 2 (dua) sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja masing-masing memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Hasil Pengukuran masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ” *Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif*”, dan tujuan ”**Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**”. Dalam Pelaksanaannya Sasaran ini didukung dengan strategi meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya aparatur dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia.

Pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.3
**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Nilai SAKIP OPD	78%	77,24%	99,03%	Sangat Tinggi (ST)
2.	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	103,22%	103,22%	Sangat Tinggi (ST)
3.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	99,24%	99,24%	Sangat Tinggi (ST)
4.	Persentase Temuan Material	3%	0,26%	>100%	Sangat Tinggi (ST)
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA				100,37%	Sangat Tinggi (ST)

Tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas menunjukkan rata-rata realisasi capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 1 “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**” telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **100,37%** dengan kriteria *Sangat Tinggi*

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111.4
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2018	2019	2020
1.	Nilai SAKIP OPD	75,74%	77,24%	77,24%
2.	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95,19%	100,82%	103,22%
3.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98,1%	99,24%	100%
4.	Persentase Temuan Material	0,03%	0,12%	0,26%

Hasil Pengukuran kinerja indikator dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya menunjukkan telah mengalami kenaikan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP OPD, Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik. Untuk Indikator Nilai SAKIP OPD tahun 2020 masih menggunakan capaian tahun 2019 dan akan disajikan nilainya pada Laporan Kinerja tahun 2021, karena penilaian SAKIP dilaksanakan setelah Laporan Kinerja ini dibuat.

Sedangkan 1 (satu) indikator Persentase Temuan Material walaupun mengalami kenaikan persentase temuan namun belum melampaui target yang ditetapkan, artinya persentase temuan masih di bawah batas yang ditargetkan (kinerja masih dalam kriteria baik).

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Tabel 111.5
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
 TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Nilai SAKIP OPD	77,24%	81%	-
2.	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	103,22%	100%	-
3.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	99,24%	100%	-
4.	Persentase Temuan Material	0%	0%	-

Bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai bahkan melebihi target jangka menengah, terdapat 1 (satu) indikator yang menghampiri target dan terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai yaitu Nilai SAKIP OPD, namun diharapkan hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP OPD

Penilaian implementasi SAKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra masing-masing OPD.

Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perolehan hasil evaluasi **77,24%** atau kategori **“BB” (Sangat Baik)**, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6
NILAI EVALUASI SAKIP TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	25,64
2	Pengukuran Kinerja	25	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15	11,74
4	Evaluasi Internal	10	6,01
5	Capaian Kinerja	20	14,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Beberapa Rekomendasi yang diberikan dari hasil Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, antara lain :

- Menyusun seluruh dokumen perencanaan di tahun berikutnya dengan mengacu pada dokumen Renstra sehingga terjadi keselarasan antar dokumen'
- Menetapkan IKU dengan memperhatikan keselarasan dengan renstra dan kriteria indikator yang baik
- Penyusunan laporan kinerja menyajikan informasi akuntabilitas kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen kinerja
- Laporan kinerja dengan melakukan analisis terhadap capaian kinerja
- Menetapkan rencana aksi kinerja di awal tahun Tahun sesuai perjanjian kinerja dan evaluasi rencana aksi secara berkala
- Meningkatkan capaian kinerja outcome sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PK eselon II dengan Kepala Daerah

Selanjutnya tindak lanjut yang telah dilaksanakan di tahun 2020 sekaitan dengan rekomendasi di atas, sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen Perencanaan tahun 2020 telah mengacu pada Renstra OPD.
- Telah dilakukan penyesuaian IKU terhadap Indikator Renstra sesuai dengan rekomendasi TIM dari Kemenpan RB pada kegiatan coaching clinic yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Telah dilakukan perbaikan penyajian LKJ tahun 2019, dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan LKJ tahun 2020 serta telah dilakukan perbaikan analisis capaian kinerja pada LKJ tahun 2019, dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan LKJ tahun 2020.
- Tahun 2020 Telah ditetapkan Rencana Aksi di awal tahun dan dilakukan pengukuran setiap triwulan
- Tahun 2020 dilaksanakan program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019 untuk meningkatkan capaian kinerja outcome.

Hasil penialaian SAKIP, diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perumusan Rencana Strategis OPD.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, membandingkan dengan hasil capaian tahun lalu dan membandingkan dengan target jangka menengah dan capaian Nasional seperti yang telah dijabarkan pada poin-poin di atas pada LKJ ini.

Tahun 2020 Nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 102,33% sedangkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 104,61%. Angka ini menunjukkan capaian kinerja Dinas Kesehatan di tahun 2020 adalah baik dengan kategori peringkat Sangat Tinggi (ST), Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.7
RATA-RATA CAPAIAN IKK TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	PROGRAM	IKK	SATUAN	TARGET	REAL.	% CAPAIAN	KRITERIA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB)	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,-	ST
		Persentase Penduduk/Warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100,-	ST

NO.	PROGRAM	IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2	PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL PRIORITAS)	Jumlah Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	2	0	0,-	SR
3	POGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (PRIORITAS)	Jumlah Klinik Rest Area yang berfungsi	Klinik	2	0	0,-	SR
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	35	36	102,86	ST
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	Persen	50	62	124,-	ST
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	70	98,27	140,39	ST
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Nasional	Persen	75	88	117,33	ST
		Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang telah menjadi BLU	Persen	80	75,6	94,50	ST
4	PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) (PRIORITAS)	Persentase Ibu Hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persen	12	12,1	100,83	ST
		Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 HPK	Persen	6	8,97	149,50	ST
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (PRIORITAS)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	Unit	6	0	0,-	SR

NO.	PROGRAM	IKK	SATUAN	TARGET	REAL.	% CAPAIAN	KRITERIA
6	PROGRAM KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Persen	75	75	100,-	ST
		Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina	Persen	55	55	100,-	ST
		Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan	Persen	80	70	87,50	T
		Persentase Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang memenuhi syarat	Persen	92,-	93,40	101,52	ST
		Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik	Persen	57,-	67,47	118,37	ST
7	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN , BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	Persen	48	75	156,25	ST
		Persentase Posyandu Aktif		62	66,9	107,90	ST
		Prevalensi Balita Kurus (Wasting)	Persen	8,-	6,5	123,08	ST
		Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight)	Persen	21,-	11,0	190,91	ST
		Prevalensi Balita Stunting	Persen	27,59	30,59	90,19	T
		Jumlah Kematian Bayi	kasus	1.055	791	133,38	ST
		Jumlah Kematian Ibu	kasus	113	133	84,96	T
		Persentase Lansia Usia \geq 60 tahun yang mendapat pelayanan santun lansia	Persen	60	60,15	100,25	ST

NO.	PROGRAM	IKK	SATUAN	TARGET	REAL.	% CAPAIAN	KRITERIA
		Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	85	96	112,94	ST
		Angka penemuan kejadian malaria per 1000 penduduk (API)	1000 Penduduk	<1	0,17	100,-	ST
		Angka kejadian Tuberkulosis/100.000 penduduk (Case Notification Rate)	1000 Penduduk	207	205	99,03	ST
		Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	Persen	96,50	96,15	99,64	ST
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100,-	ST
		Persentase orang dengan HIV (ODHA) mendapatkan pengobatan	Persen	60	94,2	157,-	ST
9	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	Persentase kualitas air minum memenuhi syarat	Persen	90	89,96	99,96	ST
		Cakupan akses sanitasi dasar	Persen	95,-	98,99	104,20	ST
		Persentase Puskesmas yang mengembangkan program kesehatan olahraga	Persen	75	97,6	130,13	ST
		Persentase Puskesmas yang mengembangkan program kesehatan kerja	Persen	90	98,69	109,66	ST

NO.	PROGRAM	IKK	SATUAN	TARGET	REAL.	% CAPAIAN	KRITERIA
10	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100,-	ST
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100,-	ST
12	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang termuat dalam Perjanjian Kinerja	Persen	100	102,59	102,59	ST
13	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	100	100	100,-	ST
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN						103,22	ST

Dari tabel pencapaian IKK di atas terlihat ada sebanyak 41 (empat puluh satu) IKK yang diakomodir dalam 13 Program dan didukung oleh 119 kegiatan seperti yang terjabar dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Rata-rata persentase pencapaian IKK sebesar 103,22% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST), yang terdiri dari :

- Sebanyak 34 indikator dengan Kriteria Sangat Tinggi (ST)
- Sebanyak 4 (empat) indikator dengan Kriteria Tinggi (T)
- Sebanyak 3 (tiga) indikator dengan Kriteria Sangat Rendah (SR)

Faktor pendukung, penghambat dan solusi terkait pencapaian kinerja di atas lebih lanjut akan dipaparkan pada point selanjutnya.

Sedangkan 3 (tiga) indikator dengan kriteria Sangat Rendah, dapat dijelaskan bahwa telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung ke arah

pencapaian target kinerja indikator tersebut namun karena tercapainya indikator kinerja akan terealisasi bersifat multiyears, jadi secara bertahap progress kemajuan telah ada.

Tiga indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- ***Jumlah Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan***

Pembangunan RS Regional dimaksudkan untuk mendekatkan akses layanan masyarakat dengan menempatkan pada posisi strategis maupun pada titik tertentu khususnya pada daerah lintas batas, hal ini bertujuan agar rujukan pasien secara berjenjang dan terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara cepat dan tepat.

Ditahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator ini, antara lain :

- Pekerjaan Perencanaan (Manajemen Konstruksi) pembangunan RS Regional Bone
- Operasional Dukungan Administrasi
- Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Regional Bone

- ***Jumlah Klinik Rest Area yang berfungsi***

Peningkatan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Area Publik melalui pengembangan klinik rest area. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan terintegrasi dan berkesinambungan di sektor Pelayanan kesehatan Primer di Puskesmas, Pelayanan kesehatan Rujukan di RS dan Pelayanan kesehatan Tradisional.

Tahun 2020, Jumlah Klinik Rest Area yang berfungsi dengan target 2 klinik dan capaian kinerja 0 klinik (0%) namun beberapa kegiatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pembangunan klinik rest area telah dilaksanakan. Tahun 2021, ditargetkan sebanyak 3 klinik rest area, yaitu terletak di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Gowa (Malino).

- ***Jumlah RS Provinsi Yang Tertata Kelembagaannya Berdasarkan Spesialisasi***

Tercapainya indikator ini melalui pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Manajemen RS Pemerintah Prov. Sulsel ke arah Spesialisasi Rujukan, dimana strategi peningkatan kualitas dan fokus pelayanan pasien berdasarkan Spesialisasi, sehingga tingkat kinerja pelayanan lebih maksimal. Rencana Pengembangan pada 6 RS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :

1. RS Labuang Baji : Pusat Pelayanan Vaskuler (Vasculer Center)
2. RSKD Prov. Sulsel : Pusat Pelayanan Otak dan Tulang Belakang (Brain and Spine Center)
3. RS Haji : Pusat Pelayanan Sistem Pencernaan dan Hati (Gastrohepatologi Center)
4. RSKDIA Siti Fatimah : Pusat Pelayanan Anak (Child Center)
5. RSKDIA Pertiwi : Pusat Pelayanan Perempuan (Women Center)
6. RS Sayang Rakyat : Pusat Pelayanan Jiwa

Kegiatan Pendukung di tahun 2020 yaitu Pengembangan infrastruktur organisasi dan Manajemen Rumah Sakit dengan pagu anggaran.

3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN, maka ASN diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

SKP terdiri dari beberapa unsur, antara lain :

1) **Kegiatan tugas jabatan**

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada penetapan kinerja/RKT instansi masing-masing dan dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya beserta uraian tugas yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan jabatan dari yang tertinggi hingga tingkatan tertendah.

2) **Angka kredit**

Angka kredit merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai.

3) **Target**

Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, Waktu dan biaya.

a). Kuantitas

Kuantitas (Target Output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain.

b). Kualitas

Kualitas (Target Kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).

c). Waktu

Waktu (Target Waktu) merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.

d). Biaya

Biaya (Target Biaya) biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta,

miliaran, dan lain-lain. Dalam hal biaya hanya diisi oleh ASN yang secara langsung bertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Kriteria Penilaian SKP

1. 91 – 100 Sangat baik
2. 76 – 90 Baik
3. 61 – 75 Cukup
4. 51 – 60 Kurang
5. 50 ke bawah Buruk

Berdasarkan Kriteria di atas, Nilai SKP ASN di Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 111.8
NILAI SKP ASN TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KRITERIA PENILAIAN SKP	JUMLAH ASN (Orang)	PERSENTASE CAPAIAN
1	Sangat Baik	51	19,39%
2	Baik	210	79,85
3	Cukup	3	1,14%
4	Kurang	-	-
5	Buruk	-	-
JUMLAH TOTAL		263	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat Persentase ASN dengan nilai SKP baik dan sangat baik sebesar 99,24%. Sedangkan 3 orang ASN dikategorikan mempunyai nilai SKP Cukup.

4. Persentase Temuan Material

Indikator kinerja ini untuk mengukur persentase jumlah temuan penyimpangan keuangan yang material sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Tim APIP (Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan).

Persentase temuan material Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, masih jauh di bawah angka yang ditargetkan, maksudnya jumlah temuan keuangan masih sangat kecil dan diharapkan hingga periode Renstra berakhir nanti mencapai angka 0%, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.9
PERSENTASE TEMUAN MATERIAL TAHUN 2018-2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH TEMUAN MATERIAL (Rp)	PERSENTASE
2018	87.675.939.116,36	29.434.025,-	0,03%
2019	106.333.901.365,-	129.501.000,-	0,12%
2020	141.063.356.004,30,-	361.978.366,-	0,26%

Pada tahun 2020, jumlah temuan material mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga masih diperlukan pengawasan internal dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan baik dari sisi administrasi maupun peruntukkan pengelolaan penganggaran.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :

- 1) Adanya regulasi/kebijakan terkait pelaksanaan program pembangunan kesehatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- 2) Rekomendasi perbaikan dari hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019 oleh Tim dari Inspektorat Prov. Sulsel dan hasil Coaching Clinic oleh Kemenpan RB dalam pelaksanaan SAKIP, evaluasi kinerja dan penyusunan laporan
- 3) kinerja.
- 4) Adanya Cascading dan Pohon Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi sehingga pencapaian kinerja dapat maksimal.
- 5) Rekomendasi hasil Audit BPK dan Tim Inspektorat Provinsi di tahun sebelumnya dalam pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan Asset milik daerah, sebagai faktor koreksi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dalam meminimalisir terjadinya temuan material.
- 6) Peningkatan kapasitas kinerja ASN yang berdampak pada meningkatnya hasil penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP)
- 7) Dukungan Anggaran APBN/DAK sebagai subsidi penganggaran di bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Pandemi covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih satu tahun secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Kurangnya integritas dalam pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkup internal OPD.

3. Perubahan sistem aplikasi baru perencanaan, penganggaran dan evaluasi di tengah periode berjalannya Renstra dirasakan kurang efektif sehingga diperlukan penyesuaian dan penelarasan dokumen kembali.
4. Kurangnya sosialisasi kebijakan pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan daerah di internal OPD baik dari sisi administrasi maupun penggunaan anggaran, sehingga masih ditemukan penyimpangan material.
5. Dalam penilaian kinerja SKP ASN, masih ada ASN yang tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan sehingga mempengaruhi pencapaian target.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:

1. Penguatan, penegakan dan penegasan Kebijakan terkait covid-19, Integritas dan kerjasama yang maksimal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, stakeholder dan semua lapisan masyarakat.
2. Penegakan komitmen bersama dari level pimpinan OPD hingga staf dalam pelaksanaan SAKIP dan RB di lingkup OPD.
3. Dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk sinkronisasi penggunaan sistem aplikasi baru.
4. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan daerah di internal OPD lebih dimaksimalkan.
5. ASN yang melanggar kedisiplinan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp 8.066.005.647,- dengan realisasi sebesar Rp 5.916.496.967,- atau 73,35%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,37%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 27,02%.

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 100% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 73,35%, maka terdapat efisiensi sebesar 26,65%.

Tabel III.10
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.935.837.469,-	4.237.546.009,-	86,58%	100%	13,42%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.022.812.177,50,-	1.545.906.358,-	51,14%	100%	48,86%
3	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	87.320.000,-	75.289.200,-	99,80%	100%	0,20%
4	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,-	18.350.000,-	91,75%	100%	8,25%
	JUMLAH	8.066.005.647,-	5.916.496.967,-	73,35%	100%	26,65%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah didukung sebanyak 4 program dan 17 kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

2. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran.

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.935.873.469.50,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.273.546.009,- (86,58%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang di capai terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, didukung oleh 7 kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Non ASN
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor,Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Penyediaan Makanan Dan Minuman
- 7) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Kesehatan Prov Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp3.022.812.177,50,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.545.906.358,- (51,14%) dan realisasi fisik 100%. Hasil yang di capai terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung oleh 5 kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Asrama
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Dan Penggantian Suku Cadang KendaraanJabatan/Dinas

- 3) Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
- 5) Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Infomasi /Apikasi Website

4. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja.

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Program, Sekretariat Dinas Kesehatan Prov Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 87.320.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 75.289.200,- (86,22%) dan dan realisasi fisik 100%. Hasil yang di capai terlaksananya peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi didukung oleh kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah
- 3) Pengumpulan Dan Publikasi Data Dan Infomasi OPD
- 4) Penyusunan Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

5. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Kesehatan Prov Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.350.000,- (91,75%) dan fisik 100%. Hasil yang di capai terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur didukung oleh 1 kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

SASARAN 2**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu *“Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”* dengan tujuan *“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”*.

Pencapaian kinerja sasaran ini dilakukan dengan strategi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta mengendalikan penyakit. Sasaran ini juga diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.11.
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,50 tahun	70,57 tahun	100,10%	Sangat Tinggi
2.	Angka Kematian Ibu	93/ 100.000 KH	86/ 100.000 KH	108,14%	Sangat Tinggi
3.	Angka Kematian Bay	6/1.000 KH	5/1.000 KH	120%	Sangat Tinggi
4.	Prevalensi Balita Stunting	27,59 Persen	30,59%	90,19%	Tinggi
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA				104,61%	Sangat Tinggi

Tabel Pengukuran pencapaian kinerja indikator Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” di atas memperlihatkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata realisasi pencapaian kinerja telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Prevalensi Balita Stunting. Namun rata-rata nilai pencapaian kinerja sudah mencapai kriteria *Sangat Tinggi*

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2018	2019	2020
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,08 tahun	70,43 tahun	70,57 tahun
2.	Angka Kematian Ibu	92/100.000 KH	94/100.000 KH	86/100.000 KH
3.	Angka Kematian Bayi	6/100.000 KH	6/100.000 KH	5/100.000 KH
4.	Prevalensi Balita Stunting	35,6%	30,59%	30,59%

Pengukuran kinerja indikator dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya menunjukkan telah mengalami kenaikan realisasi capaian pada semua indikator kinerja sasaran ini, kecuali indikator Prevalensi Balita Stunting, masih menggunakan capaian tahun 2019 karena di tahun 2020 tidak dilaksanakan survey/riset terkait pengukuran balita stunting.

Indikator yang mengalami fluktuasi nilai capaian kinerja adalah Angka Kematian Ibu dimana meningkat di tahun 2019 dan kembali menurun di tahun 2020.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Tabel III.13
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
 TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL
 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		2020	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,57 tahun	70,80 tahun	71,47 tahun
2.	Angka Kematian Ibu	86/100.000 KH	90/100.000 KH	230/100.000 KH
3.	Angka Kematian Bayi	5/100.000 KH	4/100.000 KH	20,26/100.000 KH
4.	Prevalensi Balita Stunting	30,59%	18,59%	24,1%

Bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai bahkan melebihi target jangka menengah yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Selanjutnya terdapat 2 (dua) indikator yang belum melampaui target Nasional yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) dan Prevalensi Balita Stunting.

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya UHH menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Usia panjang dipengaruhi oleh banyak faktor, dari faktor yang mendasar seperti kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan faktor penyebab dari populasi suatu negara dapat hidup lebih lama dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial ekonomi, lingkungan dan demografi.

Data BPS terakhir memperlihatkan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mencapai angka 70,57 tahun dan telah mencapai target yang ditetapkan (70,50 tahun) dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelumnya yaitu 70,43 tahun pada tahun 2019 dan 70,08 tahun pada tahun 2018. Namun angka ini masih di bawah UHH Nasional 2019 yaitu sebesar 71,20 tahun.

Sejalan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup, Pemerintah diharapkan lebih waspada untuk mengantisipasi permasalahan kesehatan yang akan dihadapi, antara lain meningkatnya angka kejadian penyakit-penyakit tidak menular khususnya pada kelompok lanjut usia. Program dan upaya penanganan masalah lanjut usia kerap kali mengidap berbagai kelemahan dan gangguan kesehatan berupa penyakit majemuk dua atau lebih penyakit. Peningkatan Umur Harapan Hidup tidak hanya berhubungan dengan lamanya usia tetapi juga terkait dengan hidup sehat dan produktivitas.

Secara tidak langsung semua program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 berkontribusi terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup. *(Jenis program/kegiatan telah disebutkan pada Bab. II laporan ini).*

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

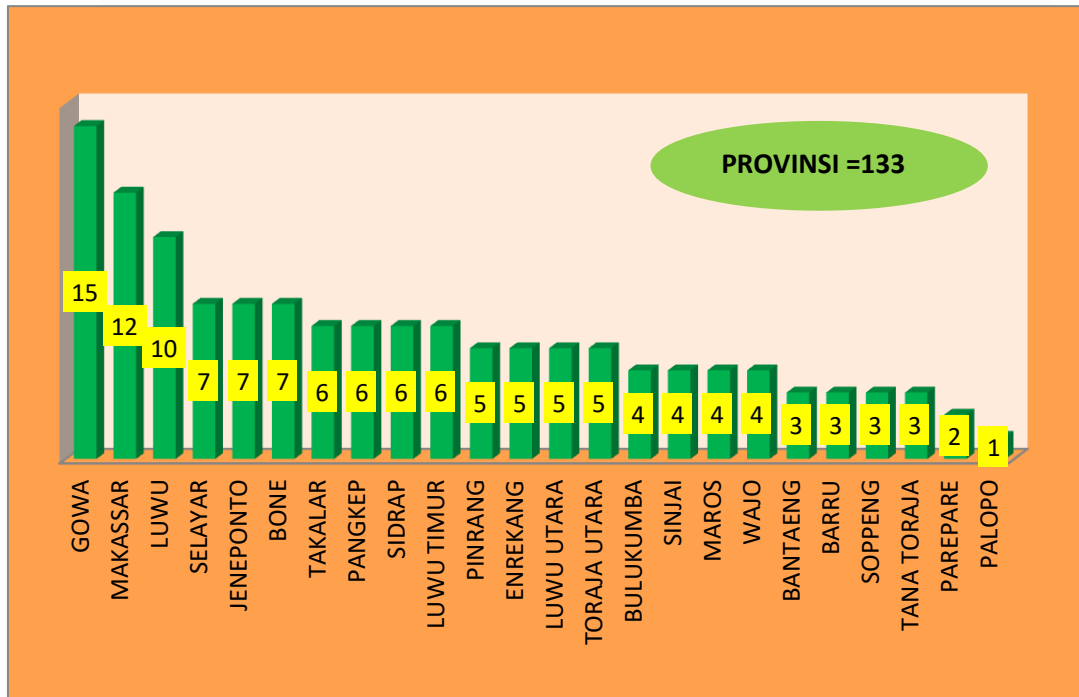
Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/incidental (ICD 10, WHO).

Jumlah kasus kematian Ibu jugamerupakan salah satu indikator utama yang berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan ketika masa nifas. Beberapa determinan penting yang mempengaruhi kasus kematian ibu secara langsung antara lain status gizi dan anemia pada kehamilan. Selain itu tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga dan pola kerja rumah tangga.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 133 kasus dan mengalami penurunan sebanyak 11 kasus dari tahun sebelumnya (tahun 2019 = 144 kasus).

Sebaran kasus jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2
**KEMATIAN IBU DI KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada pada Kabupaten Gowa sebanyak 15 kasus disusul oleh Kabupaten Luwu sebanyak 12 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian ibu terendah ada di Kota Palopo dengan jumlah 1 kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian ibu sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Perhitungan AKI di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.14
**ANGKA KEMATIAN IBU DI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2016-2020**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu hami yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Orang	156	115	139	144	133
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	148.216	150.220	150.624	152.680	154.733
AKI per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 100.000 KH)	105	77	92	94	86

Informasi mengenai jumlah kasus kematian ibu di atas akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

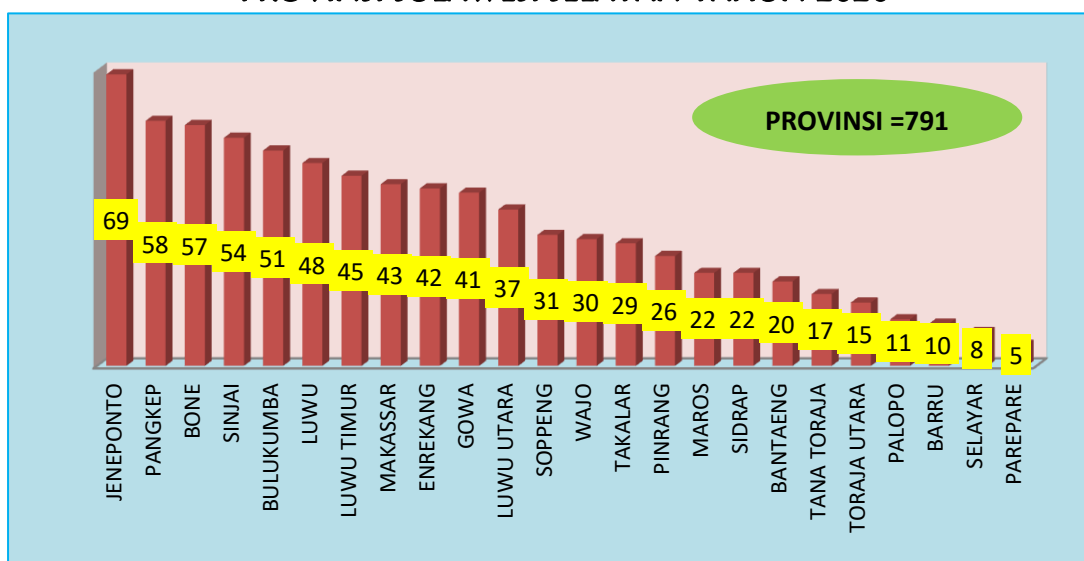
Angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AKB didefinisikan sebagai Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun yang terjadi per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu

Jumlah kasus kematian bayi erat hubungannya dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dan status sosial dari orang tua bayi tersebut. Bayi merupakan investasi SDM untuk masa yang akan datang. Kualitas kehidupan bayi secara tidak langsung akan menjadi estimasi kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Jumlah kasus kematian bayi selain merupakan indikator yang mengukur derajat kesehatan juga sebagai indikator yang menilai tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Pada tahun 2018 Jumlah Kasus kematian bayi di Sulawesi Selatan sebanyak 1.037 kasus, menurun menjadi 916 kasus di tahun 2019 dan sampai dengan penghujung tahun 2020 Jumlah kasus kematian bayi kembali menurun menjadi 791 kasus. Turunnya jumlah kasus ini menunjukkan keberhasilan upaya-upaya yang selama ini dilaksanakan dalam menekan jumlah kasus kematian. Kemajuan ini diharapkan menjadi pemacu pelakana program ke arah yang lebih baik serta dapat dijadikan rujukan dalam evaluasi pencapaian program kependudukan dalam menentukan arah pembangunan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Data jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.3
KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada pada KabupatenJenepono sebanyak 69 kasus disusul oleh KabupatenPangkep sebanyak 58 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian bayi terendah ada di Kota Pare pare dengan jumlah 5 kasus kematian bayi.

Sedangkan Angka Kematian Bayi diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian bayi sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Perhitungan AKB di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.15
**ANGKA KEMATIAN BAYI DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016-2020**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun	Orang	1.183	1.059	1.037	919	791
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	148.216	150.220	150.624	152.680	154.733
AKB per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 100.000 KH)	7	7	6	6	5

Menurunnya AKI di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam menekan jumlah kasus kematian bayi, antara lain dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola termasuk upaya promotif dan preventifdi Puskesmas. Termasuk juga peningkatan pelacakan, pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan

bayi dan diperkuat juga dengan tata kelola yang mencakup pemantauan implementasi regulasi.

4. Prevalensi Balita Stunting

Kondisi stunting merupakan masalah gizi kronis karena terkait dengan kurangnya masalah asupan gizi dalam jangka waktu yang lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Kondisi ini terjadi sejak mulai dari kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Selain pertumbuhan terhambat stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan kecenderungan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami trend fluktuasi. Tahun 2010 sebesar 36,8% meningkat menjadi 40,9% di tahun 2013 dan hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan Prevalensi Balita Stunting mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 35,6%. Selanjutnya prevalensi balita stunting berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2019 sebesar 30,59%, angka ini masih digunakan untuk mempresentasikan kondisi prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan tahun 2020, karena pada tahun 2020 tidak dilaksanakan survey nasional.

Program Pencegahan Stunting di Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada Program Prioritas Seribu Hari pertama Kehidupan (1000 HPK) sejak masa Kehamilan hingga anak berusia 2 Tahun melalui Intervensi spesifik (Upaya mengatasi penyebab langsung) dan Intervensi Sensitif. Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah Menganangkan Program Pencegahan Stunting (GAMMARA'NA) yang saat ini sedang berjalan yaitu kegiatan Penanggulangan Stunting secara terintegrasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor lainnya melalui Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat khususnya keluarga dengan sasaran 1000 HPK.

Dalam pelaksanaannya, program Gammara'na melakukan intervensi di 11 Kabupaten lokus tahun 2020, yaitu Kabupaten Enrekang, Bone, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai dan Kepulauan Selayar. Adapun bentuk intervensinya adalah terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) **Pemberian paket intervensi gizi kepada kelompok sasaran**, terdiri dari ; ibu hamil (biskuit biji labu Amizink, susu proten, kapsul kelor, tablet Fe), Baduta (multivitamin Taburia, biscuit MP-ASI), dan untuk Remaja Putri (tablet Fe). Pemberian paket bantuan intervensi gizi ini diberikan kepada 70 desa lokus (30 desa lokus di Kabupaten Enrekang dan 40 desa lokus di Kabupaten Bone).

- 2) **Pemberian paket bantuan pendampingan**, yaitu sebanyak 88 orang tenaga pendamping (70 orang Petugas Gizi Pendamping dan 18 orang Tenaga Konselor Stunting) kepada daerah/Kabupaten prioritas/lokus tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 30 Petugas Gizi Pendamping (PGP) ditempatkan di 30 desa lokus di Kabupaten Enrekang
 - Sebanyak 40 Petugas Gizi Pendamping (PGP) ditempatkan di 40 desa lokus di Kabupaten Bone
 - Sebanyak 18 Tenaga Konselor Stunting ditempatkan di 9 Kabupaten lokus tahun 2020, dengan setiap Kabupaten mendapatkan masing-masing 2 orang tenaga konselor stunting, yang akan ditempatkan di 2 desa prioritas masing-masing Kabupaten.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota baik berupa Regulasi, anggaran (bantuan dana stimulan (DAK), dana bansos/sharing untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kesehatan gratis, dana tanggap bencana/KLB, dll)
2. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan swasta yang bermitra dengan BPJS yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan kesehatan secara merata dan mampu menciptakan akses pelayanan khususnya di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga-tenaga kontrak spesialisik dan internship.
4. Adanya kelompok-kelompok UKBM (Upaya Kesehatan bersumber Masyarakat) yang melaksanakan upaya surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, KIA, Gizi, Lingkungan dan Perilaku) dan Tingkat keaktifan kader Posyandu dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas dan mutu tenaga kesehatan dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui Pelatihan-pelatihan teknis dan perbaikan manajemen SDM.
6. Kemajuan Teknologi informasi yang mempermudah penyampaian pesan-pesan kesehatan, berimbas kepada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) sehingga dapat memperbanyak dan memperkuat jejaring/mitra dalam implementasi program/kegiatan pembangunan kesehatan.

7. Adanya aplikasi pelaporan berbasis elektronik yang diharapkan dengan efektif dan cepat diperoleh data keefektifan koordinasi data dan permasalahan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mempermudah dalam proses analisa, pengambilan solusi/keputusan dan penentuan kebijakan.

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan alur kas dikarenakan pandemic covid-19, seperti yang dikemukakan pada permasalahan sasaran 1 (satu) di atas.
2. Mobilitas tenaga kesehatan yang sudah dilatih masih cukup tinggi, proses mutasi yang sering terjadi utamanya pada Puskesmas di daerah non perkotaan, sehingga menyebabkan permasalahan sama di setiap tahun dari sisi jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional, tugas rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya.
3. Belum semua sektor menyadari pentingnya program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggungjawab dirasa hanya pada OPD teknis yang bersangkutan langsung, dengan kata lain masing-masing sektor fokus pada pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran masing-masing sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal.
4. Masih adanya pandangan “Stigma Negatif” terhadap Fasilitas Pelayanan milik Pemerintah utamanya RS, adanya kasus-kasus tuntutan pada suatu RS tentang anggapan terhadap mutu pelayanan hingga dugaan malpraktik yang memperbesar pandangan negatif tersebut sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:

1. Integritas dalam penanganan covid-19 dari semua lapisan masyarakat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat berupa pendisiplinan pembatasan kontak secara tegas dan pemberlakuan pemberian punishment kepada masyarakat yang melanggar protokol covid-19.
2. Pembatasan mutasi untuk pegawai yang sudah terlatih. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya dan pelaksanaan distribusi secara proporsional
3. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.
4. Pelayanan Prima di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah baik di tingkat primer maupun rujukan utamanya peningkatan mutu pelayanan dan strategi pemasaran untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp66.818.158.487,- dengan realisasi sebesar Rp54.165.722.252,- atau 81,06%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,61%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 23,56%.

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 100% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 81,06%, maka terdapat efisiensi sebesar 6,46%.

Seperti yang terinci pada tabel berikut :

Tabel III.16
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Bencana (BSB)	250.000.000,-	58.800.000,-	20,32%	100%	79,68%
2	Program Pembangunan Rumah Sakit Regional	4.218.331.350,-	756.804.273,-	17,94%	30%	12,06%
3	Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	907.800.000,-	470.046.611,-	51,78%	100%	48,22%
4	Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	7.845.310.900,-	6.259.489.402,-	79,79%	100%	20,21%
5	Program Pengembangan Spesialisasi dan Kualitas Layanan Rumah Sakit	249.970.400,-	31.220.400,-	12,49%	100%	87,51%
6	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.464.934.200,-	3.080.062.295,-	89,89%	100%	10,11%
7	Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	20.696.391.727,-	16.952.438.175,-	81,91%	83,50 %	1,59%
8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26.536.959.910,-	24.547.530.396,-	92,50%	93,92 %	1,42%
9	Program Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	2.648.460.000,-	2.009.330.700,-	75,87%	80,25 %	4,38%
JUMLAH		66.818.158.487,-	54.165.722.252,-	81,06%	87,52%	6,46%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat didukung sebanyak 9 program dan 102 kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) /Prioritas

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini anggaran sebesar Rp250.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.800.000,- (20,32%) dan realisasi Fisik 100%. Hasil yang di capai terlaksananya program layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB), didukung oleh 2 kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Ambulans Laut
- 2) Operasional dan Krew Kapal

2. Program Pembangunan Rumah Sakit Regional Prioritas

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini anggaran sebesar Rp4.218.331.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 756.804.273,- (17,94),- dan realisasi fisik 30%. Hasil yang di capai terlaksananya program pembangunan rumah sakit regional prioritas Dinas Kesehatan, didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pembangunan Rumah Sakit Regional

3. Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini anggaran sebesar anggaran sebesar Rp907.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 470.046.611 (51,78%) dengan realisasi fisik 100% hasil yangdicapai terlaksananya Upaya kesehatan

dan standarisasi pelayanan kesehatan (Prioritas) Dinas Kesehatan, didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4. Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)/(Prioritas)

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.845.310.900 dengan realisasi keuangan Rp 6.259.489.402,- (79,79%) dan realisasi fisik 100% hasil yang di capai terlaksananya pelayanan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) prioritas, didukung oleh 3 Kegiatan :

- 1) Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi Pada Anak.
- 2) Penyediaan Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dalam rangka Penanggulangan Stunting.
- 3) Penyediaan Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan dalam rangka Penanggulangan Stunting.

5. Program Pengembangan Spesialisidan Kualitas Layanan Rumah Sakit

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp249.970.400,- dengan realisasi keuangan Rp31.220.400,- (12,49%) dan realisasi Fisik 100%. Hasil yang di capai meningkatnya infrastruktur organisasi dan manajemen UPK4, didukung oleh 1 kegiatan :

- 1) Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit

6. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp 3.464.934.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.080.062.295 (88,89%) dengan realisasi Fisik 100%. Hasil yang di capai terlaksananya program ke farmasian kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan ,didukung oleh 4 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Bahan Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium dan Bahan Logistik Kesehatan.
- 2) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kefarmasian

7. Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 20.696.391.727.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16.952.438.175,-(81,91%) dengan realisasi fisik 83,50%. Hasil yang di capai terlaksananya perbaikan gizi masyarakat, didukung oleh 30 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang (KEK) dan Balita Kurus Pada 11 Kabupaten/Lokus (DAK Fisik)
- 2) Orientasi Asuhan Gizi Ter Standar (PAG) Bagi Petugas Gizi Puskesmas (TPG) (DAK)
- 3) Pelatihan Praktek Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) (DAK)
- 4) Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk Bagi Tim Asuhan Gizi Puskesmas dan Rumah Sakit (DAK)
- 5) Konvergensi (Koordinasi Intervensi, dan Integrasi) Penanganan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (DAK)

- 6) Orientasi Kahort Bayi dan Balita
- 7) Dukungan Satker
- 8) Konsultasi dan Sinkronisasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Konsultasi DAK Kepusat
- 10) Monitoring Dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
- 11) Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020
- 12) Rapat Koordinasi Saka Bakti Husada (SBH) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
- 13) Kemitraan Jejaring Kerja dengan Mitra Potensial Terkait Germas
- 14) Penguatan Pangkalan Gugus Depan Saka Bakti Husada (SBH)
- 15) Penguatan UKBM Melalui Posyandu Aktif Kabupaten/Kota (DAK)
- 16) Orientasi Komunikasi Antar Pribadi (Kap) Terkait Stunting (DAK)
- 17) Mobilisasi Sosial Melalui Kampanye dan Pameran Germas dan Isu Nasional (Stunting, TB dan Imunisasi) (DAK)
- 18) Orientasi Pemberdayaan Lansia dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia (DAK)
- 19) Penguatan AMP (Audit Maternal Prinatal dalam rangka Penurunan AKI dan AKB (DAK)
- 20) Penguatan Pembina Kader Kesehatan Guru-Guru Paud TK tentang Buku KIA dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)(DAK)
- 21) Advokasi dan Sosialisasi Germas dan Stunting (DAK)
- 22) Orientasi Konseling dan Pelayanan KB
- 23) Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur) (DAK)

- 24) Penguatan Kabupaten/Kota dalam Membina Posyandu Remaja (DAK)
- 25) Bimbingan Teknis Pembinaan Gizi dalam rangka Penanganan Stunting di Sulawesi Selatan
- 26) Percepatan Penanganan Stunting Melalui Peran Perguruan Tinggi dan Lintas Sektor/Lintas Program Sulawesi Selatan
- 27) Orientasi Pemanfaatan Buku KIA
- 28) Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)
- 29) Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
- 30) Implementasi Penanganan Stunting Melalui Pemanfaatan Data e-PPGEMSurveilans Gizi di KabupatenLokus Stunting

8. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini anggaran sebesar Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp26.536.959.910.-dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.547.530.396.- (92,50%) dan realisasi fisik 93,92%. Hasil yang di capai terlaksananya program Pencegahan dan pengendalian penyakit, yang didukung oleh kegiatan :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 2) Sosialisasi Tatalaksana dan Diagnosa DBD/Penyakit Arbovirosis Lainnya Bagi Tenaga Dokter (DAK).
- 3) Bimtek Peningkatan Kewaspadaan Dini Penyakit DBD (DAK)
- 4) Sosialisasi Dan Advokasi Pelaksanaan POPM Kecacingan dan Mencegah
- 5) Orientasi/Sosialisasi Program P2 Hepatitis dan Penyakit ISPA
- 6) Pemeriksaan Laboratorium Hepatitis (DAK)
- 8) Bimtek Terpadu Upaya P2P Program HIV AIDS dan IMS (DAK)

- 9) Pemeriksaan Laboratorium HIV/AIDS (DAK)
- 10) Monitoring dan Evaluasi P2 ISPA
- 11) Orientasi/Sosialisasi Publik Private Mix TB Tk.Kabupaten/Kota
- 12) Supervisi Support Program TB, TB MDR dan TB HIV (DAK)
- 13) Pengadaan Media KIE Upaya Pencegahan Penyakit TB (DAK)
- 14) Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel Paket Spesimen TB (DAK)
- 15) Bimtek Program P2 Kusta dan Prambusia di Kabupaten/Kota (DAK)
- 16) Sosialisasi Survellans Vektor Malaria dan DBD Berbasis Website dan Android (DAK)
- 17) Monitoring dan Evaluasi Program Zoonosis (DAK)
- 18) Monev Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Terpadu (DAK)
- 19) Validasi Data Program P2ML (Penyakit Hepatitis dan Penyakit Infeksi SaluranPencernaan Serta Penyakit ISPA (DAK)
- 20) Pengadaan Media KIE Upaya Pencegahan Penyakit Menular (DAK)
- 21) Penyelidikan Penanggulangan KLB Penyakit Menular
- 22) Verifikasi Alert /Rumor Penyakit Menular Potensial KLB (DAK)
- 23) Pemantauan/Pelacakan Penyakit Potensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) (DAK)
- 24) Pengembangan Provinsi Epidemiologi Surveillance Team (PEST) (DAK) Review Tim Gerak Cepat (TGC) (DAK)
- 25) Pertemuan Refreshing District Suveillans Offcer (DSO) (DAK)
- 26) Penyegaran Bagi Petugas Imunisasi (DAK)
- 27) Pelaksanaan Self Assesment Vaksin Management (EVM) (DAK)
- 28) Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Serta RAD Program Imunisasi TingkatKabupaten/Kota (DAK)
- 29) Pertemuan Pembahasan Pencapaian Imunisasi dan Kasus PD3I TingkatKabupaten/Kota (DAK)

- 30) Penyusunan Renstra Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella 2020-2024 Tingkat Provinsi
- 31) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Serta Penyusunan Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TA.2021
- 32) Pengadaan Media KIE PTM (DAK)
- 33) Supervisi dan Bimlek Program P2PTM (DAK)
- 34) Seminar Kanker dalam Rangka Hari Kanker Sedunia (DAK)
- 35) Orientasi Program GIF RBM di Kabupaten/Kota (DAK)
- 36) Pelatihan Deleksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Bagi Dokter dan Bidan Puskesmas (DAK)
- 37) Supervisi dan Bimtek Program Keswa dan Napza di Kabupaten/Kota (DAK)
- 38) Sosialisasi Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Tingkat Provinsi Sulsel { DAK}
- 39) Pertemuan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Lintas Program dan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Suisel (DAK)
- 40) Sosialisasi Sistem Informasi Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi (DAK)

9. Program Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olahraga

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Sulsel. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.648.460.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.009.330.700,- (75,87%) dan realisasi fisik 80,25%. Hasil yang di capai meningkatnya penyehatan lingkungan Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, didukung oleh 20 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) (DAK)
- 2) Sosialisasi 5 Pilar STBM(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota Dan Puskesmas

- 3) Pelaksanaan Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar di Desa Lokus Stunting (DAK)
- 4) Monitoring Pasca Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar di Kabupaten Lokus Stunting (DAK)
- 5) Monitoring dan Pendampingan STBM Di Lokasi Stunting (DAK)
- 6) Orentasi dan Pembinaan Higiene Sanitasi Pemejamah Pangan dan Penanggung Jawab Tempat Pengelolaan Makanan
- 7) Pembinaan Serifikasi dan Stikerisasi Tempat Pengolaan Makanan (DAK)
- 8) Orientasi Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU) (DAK)
- 9) Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas RS dan Fasyankes Lainnya (DAK)
- 10) Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes (DAK)
- 11) Sosialisasi Desa/Kelurahan Sehat Iklim di Provinsi (DAK)
- 12) Penguatan Forum Kabupaten/Kota Sehat (DAK)
- 13) Orientasi Tim Verifikator
- 14) Mengikuti Pertemuan Kegiatan Pusat (DAK)
- 15) Konsultasi Pusat (DAK)
- 16) Sosialisasi K3 Perkantoran (DAK)
- 17) Sosialisasi Pengukuran Kebugaran ASN (DAK)
- 18) Bimbingan Teknis K3 di Fasyankes (DAK)
- 19) Orientasi Penyakit Akibat Kerja pada Petugas Kesehatan di Provinsi (DAK)
- 20) Sosialisasi Kesehatan Pengemudi (DAK)

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian intern Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam pelaksanaan anggaran dilakukan beberapa hal antara lain :

- a) Monitoring tidak langsung melalui pelaporan rutin (bulanan dan triwulan).
- b) Monitoring langsung melalui pertemuan evaluasi dan monitoring yang juga dilaksanakan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) di samping itu juga diadakan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.

Berikut penyajian Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan di bidang kesehatan :

a. *Kondisi Pendapatan Daerah*

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.812.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.728.848.769,- (64,16%), yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, dengan perincian sebagai berikut :

1. *Retribusi Jasa Umum*

Dengan target pendapatan sebesar Rp 5.744.400.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.710.878.769,- (64,26%), terdiri atas :

Retribusi Pelayanan Kesehatan

✚ UPK Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan target pendapatan sebesar Rp 960.000.000,- dan realisasi Rp 738.120.200,- (76,89%)

- 1) Jasa Sarana satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 546.000.000,- dan realisasi Rp 430.689.560,- (78,88%)
- 2) Jasa Pelayanan satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 364.000.000,- dan realisasi Rp 287.126.440,- (78,88%)

- 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis dengan target pendapatan sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi Rp 20.304.200,- (40,61%)
- ✚ UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika dengan target pendapatan sebesar Rp 4.814.400.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.972.758.569,- (61,75%)
 - 1) Tindakan Operasi satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 168.717.000,- dan realisasi Rp 99.951.200,- (59,24%)
 - 2) Obat-obatan satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 513.050.000,- dan realisasi Rp 728.228.000,- (141,94%)
 - 3) BPJS satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 1.496.000.000,- dan realisasi Rp 657.706.200,- (43,96%)
 - 4) Laboratorium satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 11.520.000,- dan realisasi Rp 9.309.600,- (80,81%)
 - 5) Pelayanan lain-lain satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 21.000.000,- dan realisasi Rp 5.640.000,- (26,86%)
 - 6) Jasa Konsultasi Medik satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 1.704.113.000,- dan realisasi Rp 772.269.400,- (45,32%)
 - 7) Jasa Sarana satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasi Rp 333.381.150,- (74,08%)
 - 8) Jasa Pelayanan satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasi Rp 333.381.150,- (74,08%)
 - 9) Denda Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS sebesar Rp 32.891.869,-

2. *Retribusi Jasa Usaha*

Dengan target pendapatan sebesar Rp 37.620.000,- dan realisasi sebesar Rp 17.970.000,- (47,77%), terdiri atas :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Sewa Rumah Dinas satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 3.420.000,- dan realisasi Rp 3.420.000,- (100%)
2. Sewa Kantin satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 1.800.000,- dan realisasi Rp 150.000,- (8,33%)
3. Sewa Aula Krida Nirmala satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 18.000.000,- dan realisasi Rp 0,- (0%)
4. ATM Bank Sulselbar (BPD) satu tahun dengan target pendapatan sebesar Rp 14.400.000,- dan realisasi Rp 14.400.000,- (100%)

b. *Situasi Anggaran Tahun 2020*

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Gambaran situasi anggaran kesehatan dan sumber pendanaan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.17
**SITUASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2020**

NO	JENIS ANGGARAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	APBN/ Dekonsentrasi	6.468.995.000,-	5.597.841.772,-	86,53%
2.	APBD-P Provinsi	141.063.356.004,30,-	123.418.808.675,-	87,49%
TOTAL		147.532.351.004,30-	129.016.650.447,-	87,45%

c. **Realisasi Anggaran**

Total Alokasi Anggaran Perubahan APBD (APBD-P) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 106.333.901.365,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 101.270.004.575,- (95,24%) dan realisasi fisik 93,35%.

a) **Belanja Tidak Langsung**

Total alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung tahun anggaran 2020 sebesar Rp 66.179.191.870,30,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 63.347.994.856,- (95,72%) dan realisasi fisik 95,83%, terdiri dari :

- 1) Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 33.642.062.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 33.570.812.535,- (99,79%) dan realisasi fisik 100%
- 2) Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 32.537.129.370,30,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.777.182.321,- (91,52%) dan realisasi fisik 91,67%.

b) **Belanja Langsung**

Total alokasi anggaran untuk belanja langsung tahun anggaran 2020 sebesar Rp 74.884.164.134,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 60.070.813.619,- (80,22%) dan realisasi fisik 91,36%, yang didukung oleh 13 Program dan 119 kegiatan.

d. **Anggaran APBN/Dekonsentrasi**

Sedangkan Total alokasi anggaran APBN/Dekonsentrasi yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.468.995.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.597.841.772,- (86,53%) dan realisasi fisik 96,11%,

yang didukung oleh 6 Program, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Kebijakan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

Alokasi anggaran sebesar Rp 2.274.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.737.113.600,- (76,37%) dan realisasi fisik 80%.

2. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.504.745.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.390.132.400,- (92,38%) dan realisasi fisik 96,67%.

3. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran sebesar Rp 641.559.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 583.843.500,- (91%) dan realisasi fisik 100%.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.071.383.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 982.539.986,- (91,71%) dan realisasi fisik 100%.

5. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Alokasi anggaran sebesar Rp 388.992.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 370.055.886,- (95,13%) dan realisasi fisik 100%.

6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Alokasi anggaran sebesar Rp 587.666.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 534.156.400,- (90,89%) dan realisasi fisik 100%.

BAB IV

PE N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di tahun 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan melalui Peningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan (SDMK), Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Penyediaan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan 13 Program dan 119 Kegiatan dengan hasil evaluasi sasaran menunjukkan rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar **104,61%** dan rata-rata pencapaian Indikator Program sebesar **103,22%**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya di atas, maka kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikategorikan baik. Faktor keberhasilan ini didukung dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh regulasi-regulasi di bidang pelayanan kesehatan, pengalokasian dana, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta adanya dukungan lintas sektor terkait yang memadai.

Beberapa hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020, secara umum antara lain pandemi covid-19 yang sampai sekarang masih berlangsung, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat maksimal dilaksanakan sesuai dengan alur kas dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu permasalahan kesehatan dirasakan masih menjadi tanggungjawab sektor kesehatan saja, sedangkan seharusnya menjadi perhatian bersama sehingga menjadi lebih efektif dalam menindaklanjuti masalah tersebut.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Kondisi umum pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan.

Demikian laporan kinerja ini kami jabarkan sebagai pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di tahun anggaran 2020, selain itu sebagai paramater untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun mendatang.

Makassar, Desember 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Health Office of South Sulawesi. The stamp contains the text 'KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN' around the perimeter and a central emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

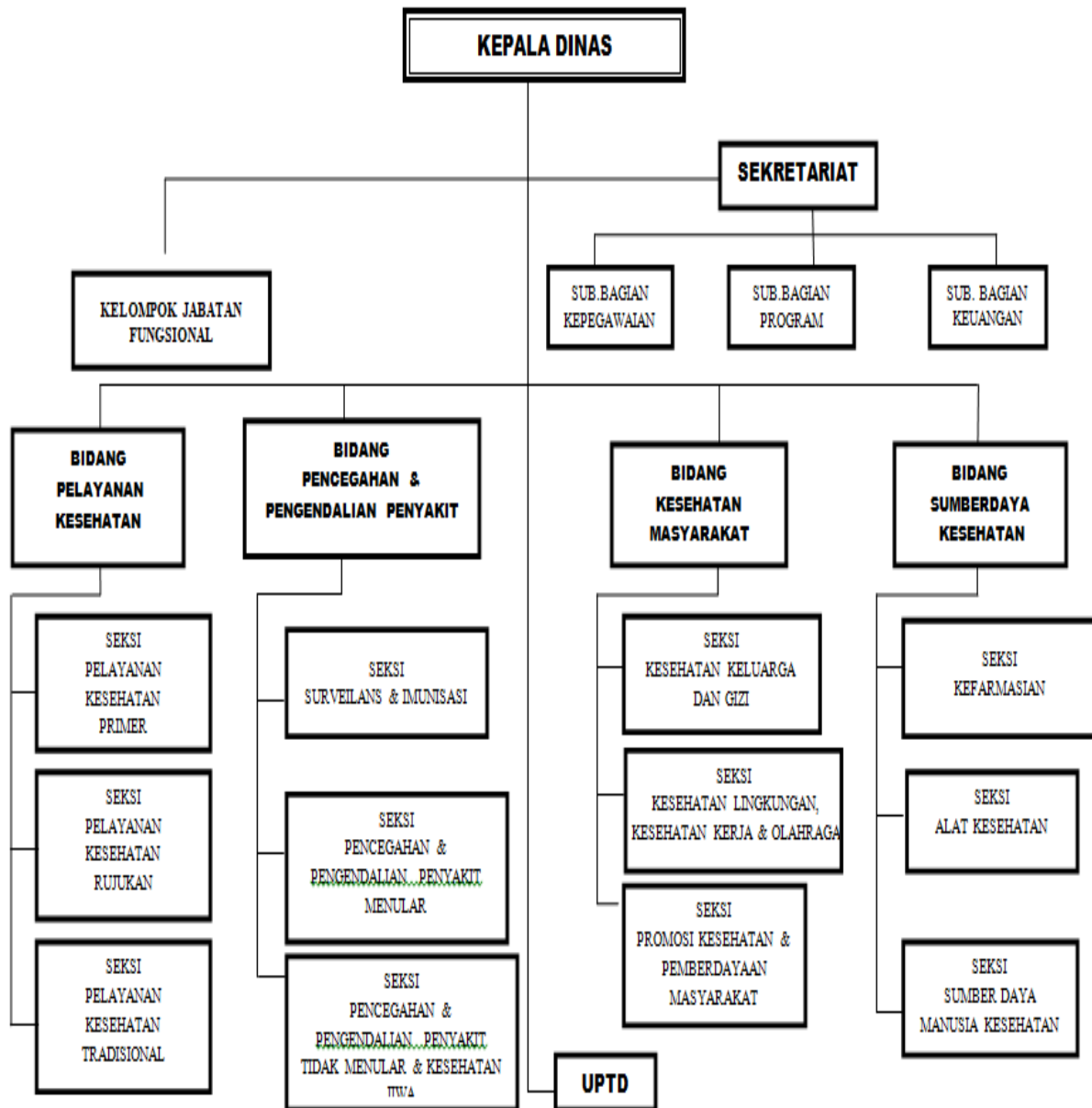
dr. H. MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, M.H.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640729 200112 1 002

Lampiran 1 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Lampiran 2 :

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL CAPAIAN TARGET	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP OPD	78%	77,24%	99,03%	
		2. Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	103,22%	103,22%	
		3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	99,24%	99,24%	
		4. Persentase Temuan Material	3%	0,26%	>100%	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Umur Harapan Hidup (UHH)	70,50 tahun	70,57 tahun	100,10%	Data BPS tahun 2020
		2. Angka Kematian Ibu	93/100.000 Kelahiran Hidup	86/100.000 Kelahiran	108,14%	
		3. Angka Kematian Bayi	6/100.000 Kelahiran Hidup	5/100.000 Kelahiran	120%	
		4. Prevalensi Balita Stunting	27,59%	30,59%	90,19%	

Lampiran 3 :

**PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2020**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB)		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penduduk/Warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100
		Pemeliharaan Ambulance Laut	Jumlah Ambulance laut yang di pelihara	Unit	-	3	-	3	-	100
		Operasional dan Krew Kapal	Jumlah ambulance laut siap siaga	Unit	-	5	-	5	-	100
2	POGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL PRIORITAS)		Jumlah Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	2	2	0	0	0	0
		Pembangunan Rumah sakit regional	Jumlah rumah sakit regional yang dibangun dan di tingkatkan kualitasnya	Unit	3	2	0	0	0	0

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	POGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (PRIORITAS)		Jumlah Klinik Rest Area yang berfungsi	Klinik	2	2	0	0	0	0
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	30	35	35,6	36	118,67	102,86
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	Persen	50	50	60,9	62	121,80	124
			Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	60	70	98,91	98,27	164,85	140,39
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Nasional	Persen	70	75	85,45	88	122,07	117,33
			Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang telah menjadi BLU	Persen	75	80	75,6	75,60	100,80	94,50
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pelayanan kegiatan kesehatan	Bulan	12	12	12	12	100	100
4	PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) (PRIORITAS)		Persentase Ibu Hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persen	11	12	12,4	12,10	112,73	100,83
			Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 HPK	Persen	5,5	6	7,03	8,97	127,82	149,50

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi pada Anak	Jumlah Pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi gizi pada anak yang terlaksana	Kabupaten Kota	2	2	2	2	100	100
		Penyediaan intervensi Gizi pada Ibu Hamil dalam rangka penanggulangan Stunting	Jumlah intervensi micronutrien pada anak umur 6-24 Bulan	Orang	-	4.878	-	4.878	-	100
		Penyediaan intervensi Micronutrient pada anak umur 6-24 bulan dalam rangka penanggulangan Stunting	Jumlah Intervensi Gizi Pada Ibu Hamil	Orang	-	5.642	-	5.642	-	100
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (PRIORITAS)		Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	Unit	6	6	0	0	0	0
		Pengembangan infrastruktur organisasi dan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah dokumen pendukung Pengembangan rumah sakit	Dokumen	3	2	3	2	100	100
6	PROGRAM KEFARMASIAN , ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Persen	70	75	80	75	114,29	100
			Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina	Persen	50	55	50	55	100	100
			Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan	Persen	70	80	64,23	70	91,76	87,50

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik	Persen	55	57	63,62	67,47	115,67	118,37
		Pengadaan Bahan Obat2an, Bahan Kimia, bahan laboratorium dan Bahan Logistik Kesehatan	Jumlah Obat2an ,Bahan Laboratorium dan bahan Logistik Kesehatan	Jenis	92	150	92	150	100	100
		Pengadaan alat2 Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	Jenis	17	10	17	10	100	100
		Dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian	terdistribusinya obat program ke kab/kota	Kab/kota	-	24	-	24	-	100
		Dana alokasi Khusus (DAK) Fisik Kefarmasian	Tersedianya sarana Penyimpangan dan alat pengolah data dan instansi farmasi Provinsi	Unit	50	7	50	7	100	100
7	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN , BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (DAK)		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	Persen	45	48	62,5	75	138,89	156,25
			Persentase Posyandu Aktif	Persen	61	62	63,95	67	104,84	107,90
			Prevalensi Balita Kurus (Wasting)	Persen	8,25	8	5,7	7	69,09	81,25
			Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight)	Persen	22	21	11	11	50	52,38
			Prevalensi Balita Stunting	Persen	33	27,59	30,59	30,59	92,70	110,87
			Jumlah Kematian Bayi	kasus	1.057	1.055	916	791	86,66	74,98
			Jumlah Kematian Ibu	kasus	114	113	144	133	126,32	117,70
			Persentase Lansia Usia ≥ 60 tahun yang mendapat pelayanan santun lansia	Persen	50	60	60,15	60,15	120,30	100,25

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang kronik (KEK) dan Balita Kurus pada 11 Kabupaten Lokus (DAK Fisik)	Jumlah ibu hamil dan KEK dan Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	Buku balita kurus	-	19.789	-	19.789	-	100
		Orientasi Asuhan Gizi terstandart (PAG) bagi petugas gizi Puskesmas (TPG) (DAK)	Jumlah peserta orientasi asuhan gizi terstandart (PAG)	Orang	-	90	-	90	-	100
		Pelatihan Praktek Pemberian makanan Bayi dan Anak (PMBA) (DAK)	Jumlah Peserta Pelatihan Praktek Pemberian Makanan bayi dan balita	Orang	-	30	-	30	-	100
		Pelatihan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk bagi Tim Asuhan Gizi puskesmas dan rumah sakit (DAK)	Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan dan tatalaksanaan	Orang	-	60	-	60	-	100
		Konvergensi (Koordinasi, Intervensi, dan Integrasi) Penanganan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (DAK)	jumlah peserta pertemuan konvergensi(koordinasi,intervensi, dan integrasi) penanganan stunting melalui pemanfaatan Dara E-ppgbm surveilans Gizi	Orang	-	220	-	220	-	100
		Orientasi Kohort Bayi Dan Balita	Jumlah Peserta Orientasi kohort bayi dan balita	Orang	-	552	-	0	-	0
		Dukungan Satker	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	4	4	4	0	100	0
		Konsultasi dan sinkronisasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tertindakannya konsultasi dan sinkronisasi program promosi kesehatan ke pusat	Kali	-	4	-	4	-	100
		Konsultasi DAK ke Pusat	Jumlah petugas pengelola DAK yang melaksanakan konsultasi/pertemuan	Orang	-	3	-	3	-	100
		Monitoring dan evaluasi terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Terpantaunya pelaksanaan DAK bidang kesehatan di kab/kota	kab/kota	24	24	24	24	100	100
		Pemantauan evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020	jumlah peserta pertemuan evaluasi pelaksanaan DAK ta 2020	Orang	-	90	-	90	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rapat Koordinasi Saka Bakti Husada (SBH) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Tertindakannya Koordinasi Sbh antara pembina Sbh kab/kota	Orang	-	30	-	30	-	100
		Kemitraan Jejaring Kerja dengan mitra Potensial Terkait Germas	Adanya mitra potensial dalam mendukung germas	kelompok	-	5	-	5	-	100
		Penguatan Pangkalan Gugus Depan Saka Bakti Husada (SBH)	Tertindakannya Konsultasi Revitalisasi Pada Penguatan Struktur SBH (Tingkat Cabang, Ranting dan pangkalan sbh di Kab/Kota	Tahun	-	1	-	1	-	100
		Penguatan UKBM Melalui Posyandu Aktif Kab/Kota (DAK)	Terbinanya Posyandu aktif Kabupaten/kota Lokus Stunting	Posyandu aktif	-	3.161	-	3.151	-	100
		Orientasi Komunikasi antar Pribadi (KAP) terkait Stunting (DAK)	Jumlah Peserta orientasi Bagi petugas Tenaga Kesehatan Kab/Kota Terkait Stunting	Orang	-	30	-	30	-	100
		Mobilisasi sosial melalui kampanye dan pameran germas dan isu nasional (Stunting, Tb, dan Imunisasi) (DAK)	Tersebaranya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan isu Nasional (Stunting, TB, Imunisasi) Melalui Kampanye Kesehatan	Kali	-	1	-	1	-	100
		Orientasi Pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status Kesehatan lansia (DAK)	Jumlah Peserta Orientasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status Kesehatan lansia	Orang	-	60	-	60	-	100
		Penguatan AMP (Audit Maternal Prinatatal dalam rangka penurunan AKI dan AKB (DAK)	Jumlah Peserta Penguatan AMP (Audit Maternal Parenatal) dalam rangka penurunan AKI dan AKB	Orang	-	90	-	90	-	100
		Penguatan Pembina Kader Kesehatan Guru2 Paud /tk tentang buku kia dan dan stimulasi Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (sdidtk) (DAK)	Jumlah Peserta Penguatan Pembina Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA tentang buku KIA dan Stimulus, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (sdidtk)	Orang	-	84	-	0	-	0

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Advokasi dan sosialisasi Germas dan Stunting (DAK)	Tersosialisasinya Germas dan Stunting di Kab/Kota dan Meningkatnya Komitmen Lintas sektor Tentang Germas dan Stunting	Kab/kota	-	11	-	11	-	100
		Orientasi Konseling dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi konseling dan pelayanan KB	Orang	-	60	-	60	-	100
		Orientasi Pelayanan Kesehatan reproduksi masa sebelum hamil (Calon pengantin dan pasangan usia Subur) (DAK)	Jumlah Peserta Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin Dan pasangan usia Subur)	Orang	-	60	-	60	-	100
		Penguatan Kab/Kota dalam membina posyandu Remaja (DAK)	Jumlah Peserta Penguatan Kab/Kota Dalam membina posyandu remaja	Orang	-	76	-	76	-	100
		Bimbingan teknis pembinaan gizi dalam rangka penanganan Stunting di sulsel	Terpantaunya Penanganan Masalah Gizi (Underwight, Wesling dan Stunting) di kab/kota	Kab/kota	-	24	-	24	-	100
		Percepatan Penanganan Stunting melalui peran perguruan tinggi dan lintas sektor/lintas Program Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Pertemuan Percepatan Penanganan Stunting Melalui Peran Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan	Orang	-	100	-	0	-	0
		Orientasi Pemanfaatan buku KIA	Jumlah Peserta Orientasi Pemamfaatan Buku KIA	Orang	-	600	-	0	-	0
		Orientasi Ante Natal Care (ANC) terpadu dan Post Natal Care (PNC)	Jumlah peserta Orientasi Ante Natal (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)	Orang	-	160	-	80	-	50
		Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial	Jumlah Peserta Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial	Orang	-	174	-	87	-	50
		Implementasi Penanganan Stunting melalui Pemanfaatan data E-PPGBM Surveilans Gizi di kab Lokus Stunting	Jumlah Peserta Implementasi Penangan Stunting	Orang	-	1.915	-	1.915	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK)		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Persen	40	50	40	45	100	90
			Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	80	85	80	96	100	112,94
			Angka penemuan kejadian malaria per 1000 penduduk (API)	1000 Penduduk	<1	<1	0,1	0,17	>100	>100
			Angka kejadian Tuberkulosis/100.000 penduduk (Case Notification Rate)	100.000 Penduduk	202	207	160	160	79,21	77,29
			Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	Persen	96,5	97	96,15	96	99,64	99,64
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100,00
			Persentase orang dengan HIV (ODHA) mendapatkan pengobatan	Persen	55	60	53,19	94,2	96,71	157
		Monitoring dan evaluasi Program pengendalian penyakit Tidak menular	Jumlah kab/kota sasaran monitoring dan evaluasi program pengendalian penyakit tidak menular	Kab/kota	-	24	-	15	-	62,50
		Sosialisasi tatalaksana dan diagnosis DBD Penyakit arbovirus lainnya bagi tenaga dokter (DAK)	Jumlah petugas yang Mendapatkan Sosialisasi Tatalaksana Kasus penyakit DBD/Arbovirus di Kab/Kota	orang	-	49	-	49	-	100
		Bimtek Peningkatan kewaspadaan dini penyakit DBD (DAK)	Jumlah Petugas yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kewaspadaan Dini Penyakit DBD	orang	-	300	-	300	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan POPM kecacingan dim mencegah dan menanggulangi stunting di kab/kota (DAK)	Jumlah petugas yang Mendapatkan sosialisasi dan advokasi Pelaksanaan POPM Kecacingan dalam Mencegah dan Menanggulangi Stunting di Kab/Kota	Orang	-	378	-	378	-	100
		Orientasi/Sosialisasi Program P2 Hepatitis dan Penyakit ISPA	Terlaksananya Pemeriksaan Hepatitis Pada Kelompok sasaran	orang	-	320	-	320	-	100
		Pemeriksaan laboratorium Hepatitis (DAK)	terlaksananya pemeriksaan hepatitis pada kelompok sasaran	orang	1.000	165	1.000	165	100	100
		Bimtek terpadu Upaya P2P Program HIV AIDS dan IMS (DAK)	Jumlah petugas yang mendapatkan Bimtek terpadu Upaya P2P Program HIV Aids dan IMS (DAK)	orang	100	480	100	480	100	100
		Pemeriksaan laboratorium HIV/AIDS (DAK)	Terlaksananya Pemeriksaan Viral Load Pada Odha	orang	180	115	180	115	100	100
		Monitoring dan Evaluasi P2 ISPA	Terpantaunya Hasil Cakupan Program P2 Ispa di Kab/Kota	kab/kota	-	10	-	10	-	100
		Orientasi/Sosialisasi Publik Private Mix Tb Tk.Kab/kota	Jumlah Petugas yang mendapat Sosialisasi Publik Private Mix TB Tingkat kab/Kota (DAK)	orang	-	175	-	175	-	100
		Supervisi Supportif Program TB.TB MDR dan TB HIV (DAK)	Terpantaunya Hasil Cakupan Program TB<TB MDR dan TB HIV (DAK) di Kab/Kota	kab/kota	-	11	-	11	-	100
		Pengadaan Media Kie Upaya Pencegahan Penyakit TB (DAK)	Jumlah media KIE program TB Yang Tersedia	buah	-	1.760	-	1.760	-	100
		Pengiriman dan Pemeriksaan sampel Paket Spesimen TB (DAK)	Jumlah Spesimen TB Yang Dikirim dan Diperiksa	Spesimen	-	55	-	55	-	100
		Bimtek Program P2 Kusta dan Prambusia di kab/Kota (DAK)	Jumlah petugas yang Mendapatkan Bimbingan teknis Terpadu Program Kusta dan Frambusia	orang	8	220	8	220	100	100
		Sosialisasi Survellans Vektor Malaria dan DBD berbasis Website dan android (DAK)	Jumlah peserta sosialisasi Surveilans Malaria dan DBD Berbasis Website dan Android	orang	-	97	-	97	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Monitoring dan Evaluasi Program Zoonosis (DAK)	Terpantaunya Hasil Cakupan Program Zoonosis di Kab / Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	100	100
		Monev Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Terpadu (DAK)	Terpantaunya Program dan pengendalian Penyakit menular (P2PM) di Kab/Kota	kab/kota	-	24	-	24	-	100
		Validasi Data Program P2ML (Penyakit Hepatitis dan penyakit infeksi Saluran Pencernaan serta penyakit ispa)	Tersedianya Data P2 PM yang Valid	laporan	-	24	-	24	-	100
		Pengadaan Media KIE Upaya Pencegahan Penyakit menular (DAK)	Tersedianya Media KIE Program Pencegahan Penyakit Menular	lembar	-	1.000	-	1.000	-	100
		Penyelidikan /Penanggulangan KLB Penyakit menular	Tertanggulangnya klb penyakit di kab/kota	kab/kota	24	12	24	12	100	100
		Verifikasi alat/Rumor Penyakit menular Potensial KLB (DAK)	Terselenggaranya Kewaspadaan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap KLB	kali	10	10	10	5	100	50
		Pemantauan /Pelacakan Penyakit Potensi kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) (DAK)	Terpantaunya/terlacaknya Penyakit potensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)	kali	-	1	-	1	-	100
		Pengembangan Provincial Epidemiologi Surveillance Team (PEST) (DAK)	Tersedianya Buletin Epidemiologi Penyakit Menular	exemplar	-	70	-	70	-	100
		Review Tim Gerak Cepat (TGC) (DAK)	Jumlah peserta Pertemuan Tim Gerak Cepat (TGC)	tim	-	12	-	12	-	100
		Pertemuan Refreshing District surveillans Officer (DSO) (DAK)	Jumlah Peserta Pertemuan Refreshing District Surveillans Officer (DSO)	orang	-	24	-	20	-	83,33
		Penyegaran Bagi Petugas Imunisasi (DAK)	Jumlah Peserta Penyegaran bagi Petugas Imunisasi	orang	-	58	-	58	-	100
		Pelaksanaan Self Assesment Vaksin Management (EVM) (DAK)	Penilaian pengelolaan Manajemen Vaksin Imunisasi	kab/kota	-	9	-	9	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pertemuan Evaluasi dan perencanaan serta RAD Program Imunisasi Tingkat Kab/Kota (DAK)	Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi, Perencanaan Dan Rad Program imunisasi Tingkat Kab/Kota (DAK)	dokumen	-	24	-	24	-	100
		Pertemuan Pembahasan Pencapaian Imunisasi dan Kasus PD3 Tingkat Kab/Kota (DAK)	Jumlah Peserta Pertemuan Pembahasan Pencapaian Imunisasi Dan Kasus PD3I Tingkat kab/Kota	orang	88	72	88	72	100	100
		Penyusunan Renstra Eliminasi Campak dan pengendalian Rubella 2020-2024 Tingkat Provinsi	Tersusunnya Renstra Eliminasi campak dan Pengendalian Rubella 2020 -2024 Tingkat Provinsi (DAK)	dokumen	-	1	-	1	-	100
		Pertemuan monitoring dan evaluasi serta penyusunan Kegiatan Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit TA.2021	Jumlah Peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Serta Penyusunan Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit T.A 2021	orang	-	87	-	87	-	100
		Pengadaan Media KIE PTM (DAK)	Tersedianya Media KIE Program Pengendalian Penyakit tIDAK Menular	buah	-	2.233	-	2.233	-	100
		Supervisi dan bimtek Program P2PTM (DAK)	Terpantaunya dan Terbinanya Pelaksanaan Program P2PTM	kab/kota	-	24	-	12	-	50
		Seminar Kanker dalam rangka hari kanker sedunia (DAK)	Jumlah Peserta Seminar Dalam Rangka Hari Kanker Sedunia	orang	2.000	320	2.000	320	100	100
		Orientasi Program GIF RBM Di Kab/Kota (DAK)	Jumlah Orientasi Program GIF RBM	orang	-	60	-	60	-	100
		Pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara bagi dokter dan Bidan Puskesmas (DAK)	Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher rahim Dan Payudara Bagi Dokter Dan Bidan Puskesmas	Orang	-	30	-	0	-	0
		Supervisi dan Bimtek Program Keswa dan napza di Kab/Kota (DAK)	Terpantaunya dan terbinnya Pelaksanaan program Keswa Dan Napzah	kab/kota	-	18	-	18	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sosialisasi manajemen Pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza di Tingkat Provinsi Sulsel (DAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Manajemen Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Jiwa dan Napzah Di Tingkat Prov.SulSel Penyakit	orang	-	60	-	60	-	100
		Pertemuan masalah kesehatan jiwa dan Napza Lintas Program dan lintas sektor Tingkat Provinsi Sulsel (DAK)	Jumlah peserta pertemuan masalah kesehatan jiwa dan napza lintas program dan lintas sektor tingkat Provinsi	orang	-	80	-	80	-	100
		Sosialisasi Sistem Informasi Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi (DAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem informasi Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi (DAK)	orang	-	24	-	24	-	100
9	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA (DAK)		Persentase kualitas air minum memenuhi syarat	Persen	89	90	80	90	89,89	100
			Cakupan akses sanitasi dasar	Persen	93	95	96,66	98,99	103,94	104,20
			Persentase Puskesmas yang mengembangkan program kesehatan olahraga	Persen	70	75	97,6	97,6	139,43	130,13
			Persentase Puskesmas yang mengembangkan program kesehatan kerja	Persen	88	90	98,69	98,69	112,15	109,66
		Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) (DAK)	Disepakatinya peran dan tanggung jawab kab/kota pada pelaksanaan surveilans kualitas air minum tahun 2020	kab/kota	24	24	24	24	100	100
		Sosialisasi 5 Pilar STBM(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Bagi tenaga Kesehatan di kabupaten /kota dan Puskesmas	Meningkatnya Pemahaman serta adanya kebijakan dalam pelaksanaan stbm	kab/kota	-	11	-	11	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksanaan Pemicuan STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar di Desa Lokus Stunting (DAK)	Meningkatnya akses sanitasi dasar masyarakat dengan adanya perubahan perilaku untuk ber PHBS	Kab/kota	-	11	-	11	-	100
		Monitoring Pasa pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Pilar di Kabupaten Lokus Stunting (DAK)	terimplementasinya 5 pilar STBM di Setiap Rumah tangga	kab/kota	-	11	-	0	-	0
		Monitoring dan pendampingan STBM di lokasi stunting (DAK)	terbentuknya desa binaan stbm di kab/kota	Desa Binaan stbm	-	22	-	22	-	100
		Orentasi dan pembinaan Higiene sanitasi pangan p[er]jamah pangan dan penanggung jawab tempat pengelolaan makanan	tersedianya petugas terampil dan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan tpm yang baik ,perjamah dan penanggung jawaban tempat pengelolaan makanan	orang	-	50	-	0	-	0
		Pembinaan sertifikasi dan stikerisasi tempat pengelolaan makanan (DAK)	terlaksananya sertifikasi dan stikerisasi tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat di kab/kota	kab/kota	-	24	-	24	-	100
		Orentasi tempat pengawasan tempat fasilitas Umum (TFU) (DAK)	Jumlah peserta orientasi pengawasan tempat2 Umum	Orang	-	50	-	50	-	100
		Peningkatan kapasitas dalam rangka pengelolaan limbah medis bagi petugas puskesmas RS dan fasyankes lainnya (DAK)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas,RS Dan Fasyankes Lainnya	orang	-	37	-	37	-	100
		Pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah medis Fasyankes (DAK)	Terpantaunya Pengelolaan Limbah Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	orang	-	50	-	50	-	100
		Sosialisasi Desa/Kelurahan sehat iklim di Provinsi (DAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Desa/Kelurahan Sehat Iklim Di provinsi	orang	-	50	-	50	-	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penguatan Forum Kab/Kota Sehat (DAK)	Jumlah Peserta Pertemuan Penguatan Forum Kab/Kota Sehat	orang	-	76	-	76	-	100
		Orientasi Tim Verifikator	Jumlah Peserta Orientasi Tim Verifikator	orang	-	58	-	58	-	100
		Mengikuti pertemuan Kegiatan Pusat (DAK)	Keikutsertaan Dalam Pertemuan Kegiatan Pusat	orang	-	2	-	2	-	100
		Konsultasi Pusat (DAK)	Jumlah Petugas Yang Melakukan konsultasi Pusat	orang	-	3	-	0	-	0
		Sosialisasi K3 Perkantoran (DAK)	Jumlah peserta Sosialisasi K3 Perkantoran	Orang	-	72	-	72	-	100
		Sosialisasi pengukuran kebugaran ASN (DAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengukuran Kebugaran ASN	orang	-	76	-	76	-	100
		Bimbingan teknis K3 di fasyankes(DAK)	Jumlah Petugas yang mendapatkan Bimbingan Teknik K3 Fasyankes di Kab/Koa	kab/kota	-	24	-	24	-	100
		Orientasi Penyakit Akibat kerja pada petugas kesehatan di Provinsi (DAK)	Jumlah Peserta yang mendapat Orientasi Penyakit Akibat Kerja pada Petugas Kesehatan Di Provinsi	Orang	-	60	-	60	-	100
		Sosialisasi Kesehatan Pengemudi (DAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Kepada Sektor Terkait Tentang Kesehatan Pengemudi	Orang	-	52	-	52	-	100
10	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan jasa Komunikas,sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya tagihan telpon'air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	100	100
		Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 yg terbayarkan	Unit	47	51	35	35	74,47	68,63
			Jumlah pajak kendaraan Dinas/Operasional roda 2 yg terbayarkan	Unit	7	23	7	16	100	69,57
		Penyediaan jasa Tenaga Non PNS	Jumlah jasa tenaga PNS	Orang	63	65	63	65	100	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ATK Yang tersedia	Jenis	36	36	36	36	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit	15	30	15	30	100	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan yg tersedia	Jenis	3	3	3	3	100	100
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas	kali	100	117	100	117	100	100
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor/ Asrama	Jumlah unit gedung kantor/Asrama dan kondisi baik	unit	1	8	0	8	0	100
		Pemeliharaan Rutin/berkala dan penggantian suku cadang Kendaraan Jabatan/dinas	Jumlah kendaraan Jabatan/dinas yang di pelihara	Unit	50	23	50	23	100	100
		Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	7	105	0	105	0	100
		Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan dan peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang di pelihara	Unit	30	90	30	90	100	100
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi /Aplikasi website	Jumlah sistem informasi /Aplikasi yg di pelihara dan di kembangkan	sistem informasi	7	10	7	10	100	100
			jumlah berita/informasi yang di posting di website	berita/ informasi	200	200	200	200	100	100

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang termuat dalam Perjanjian Kinerja	Persen	100	100	100,82	102,59	100,82	102,59
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat daerah	Orang	100	100	100	100	100	100
		Penyusunan dan evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik pokok maupun perubahan yg tersusun yg ditetapkan	Dokumen	4	4	4	4	100	100
			Jumlah dokumen Renstra yg di susun dan di tetapkan	Dokumen	1	1	1	1	100	100
			Jumlah dokumen Evaluasi pada yang di susun dan di laporkan	Dokumen	4	5	4	5	100	100
		Pengumpulan dan Publikasi data dan informasi OPD	Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan jumlah data dan informasi yang terpublikasi	Laporan	84	84	84	84	100	100
		Penyusunan dan pengelolaan administrasi Keuangan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	Laporan	12	12	12	12	100	100
13	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	100	100	100	100	100	100
		Penyusunan dan pengelolaan administrasi Kepegawain	Jumlah Aparat OPD yg di kelola administrasi kepegawain yg di susun	Orang	527	527	527	527	100	100